

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu wujud dinamisasi perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran. Konsep-konsep dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perlu dipertajam sehingga tidak menyimpang dari tujuan dan sasarannya. Pijakan dasar program/kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, dengan tujuan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban terhadap publik terutama pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

Sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan bagi Dinas Pertanian dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian maka disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai yang berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 5/2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; bahwa Rancangan Awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD dan Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan Rancangan RPJMD. Selanjutnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026 ini diharapkan menjadi acuan untuk tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan, terjabarkannya program dan kegiatan, terlaksananya koordinasi dan keterpaduan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas, selain itu diharapkan juga saran-saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga akan menjadi lebih sempurna di masa akan datang.

Sei Rampah, 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai

BUDY ISKANDAR, SP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 197802082005021001

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	I.1
	1.1. Latar Belakang.....	I.1
	1.2. Landasan Hukum	I.3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I.7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	II.1
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	II.1
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.13
	2.3. Kinerja Pelayanan	II.21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III.10
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	III.14
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III.18
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV.1
	4.1. Tujuan dan Sasaran.....	IV.1
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V.1
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	V.1
	5.2 Strategi.....	V.1
	5.3 Arah Kebijakan.....	V.2
	5.4 Dukungan OPD Terkait Dalam Pembangunan Pertanian.....	V.2
BAB VI	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai.....	II.13
Tabel 2.2	Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN.....	II.14
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai.....	II.14
Tabel 2.4	Luas Baku Lahan Sawah.....	II.19
Tabel 2.5	Luas Baku Lahan Bukan Sawah.....	II.19
Tabel 2.6	Luas Lahan Perkebunan Rakyat.....	II.19
Tabel 2.7	Luas Lahan Perkebunan Negara, Swasta dan Daerah Tahun 2020.....	II.20
Tabel 2.8	Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Pertanian Keadaan per Juli 2023.....	II.22
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2016-2020.....	II.20
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian 2016-2020 berdasarkan Sumber dana dan Program.....	II.24
Tabel 3.1	Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.....	III.1
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	III.1
Tabel 3.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....	III.2
Tabel 3.4	Kontribusi PDRB berdasarkan Sub Sektor.....	III.2
Tabel 3.5	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah di Dinas Pertanian.....	III.3
Tabel 3.6	Alih Fungsi Lahan.....	III.5
Tabel 3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Oencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III.10
Tabel 3.8	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Tahun 2020-2024	III.12
Tabel 3.9	Pemasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra K/L....	III.13
Tabel 3.10	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Renstra Dinas KPTPH Provinsi Sumatera Utara.....	III.14
Tabel 3.11	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	III.16
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pertanian	IV.2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	V.2
Tabel 5.2	Dukungan Program Perangkat Daerah Terkait dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	V.3

Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Dionas Pertanian Tahun 2021 – 2026.....	VI.2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026.....	VII.2
Tabel 7.2	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.....	VII.4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.....	II.12
Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	II.15
Gambar 2.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	II.15
Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	II.16
Gambar 4.1 Pohon Kinerja Dinas Pertanian.....	IV.8
Gambar 4.2 Cascading Level Es II, III, IV dan Fungsional/Staf.....	IV.9
Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	II.16
Gambar 5.1 Cross cutting dukungan Program OPD terkait terhadap tujuan dan sasaran Dinas Pertanian.....	V.6
Gambar 5.2 Cross cutting dukungan OPD terkait terhadap tujuan dan sasaran Dinas Pertanian.....	V.7
Gambar 5.3 Cross cutting Bidang terhadap Program untuk Mencapai Sasaran Dinas Pertanian.....	V.8



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan

dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
 10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
 11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
 12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
 14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
 15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda

3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan Urusan Pertanian

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Pertanian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan,

antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pertanian harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; 23.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
32. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
33. Peraturan Bupati NomorTahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten

- Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pertanian.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten serdang bedagai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dalam kesehariannya melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Dinas Pertanian

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepa daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- 2) pengembangan prasarana pertanian;
- 3) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman hijauan dan penyuluhan;
- 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 5) pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 6) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- 7) pembinaan pengolahan hasil pertanian;
- 8) pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- 9) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;



- 10) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang pertanian dan penyuluhan.

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian

Tugas

Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub perkebunan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan pertanian;
- 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 3) Pengembangan prasarana pertanian
- 4) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 5) Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 6) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- 7) Fasilitasi penanggulangan bencana alam;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 9) Pembinaan pengolahan hasil pertanian;
- 10) Pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- 11) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 12) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- 1) Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta penyuluh pertanian
- 2) Melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
- 3) Melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 4) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;



- 5) Melaksanakan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 6) Melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang administrasi pertanian;
- 7) Memantau pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- 8) Melaksanakan fasilitasi penanggulangan bencana alam;
- 9) Mengarahkan pembinaan pengolahan hasil pertanian;
- 10) Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- 11) Mengarahkan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 12) Melaksanakan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 13) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris

Tugas

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan pertanian;
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengelolaan urusan ASN;
- 6) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana lingkup dinas pertanian;
- 3) Mengkoordinir penyusunan perencanaan anggaran, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian untuk bahan penyusunan LKPJ Bupati;
- 4) Mengkoordinir penyusunan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- 5) Mengkoordinir bahan dan dokumen dalam pelaksanaan tata usaha, surat menyurat dan pembinaan ASN;
- 6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang untuk memperoleh masukan dalam penyusunan anggaran program masing-masing bidang;
- 8) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang;
- 9) Melaksanakan pembinaan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan dan akuntabilitas, kepegawaian dan umum, keuangan dan perlengkapan;
- 10) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Menyiapkan bahan perhitungan pelaksanaan anggaran dinas;
- 12) Menyiapkan bahan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- 13) Mengelola administrasi, keuangan, perlengkapan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- 14) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 15) Menghimpun dan mengkoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas.

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- 3) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 6) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- 7) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- 8) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 9) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 11) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas

Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan pengembangan ekspor.



Fungsi

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten;
- 4) Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- 6) Pembangunan prasarana pertanian;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- 8) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- 9) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 10) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit;
- 11) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- 12) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- 13) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- 14) Penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 15) Pameran dagang lokal;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas

Membantu Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Fungsi

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- 3) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;



- 4) Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (opt) tanaman pangan, hortikultura;
- 5) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perkebunan

Tugas

Membantu Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian pengendalian dan penanggulangan bencana alam.

Fungsi

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- 4) Pembangunan prasarana pertanian;
- 5) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- 6) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- 8) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman perkebunan;
- 9) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha perkebunan;
- 10) Penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penyuluhan

Tugas

Membantu kepala dinas menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan program penyuluh pertanian.



Fungsi

- 1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- 5) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- 6) penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- 7) Pembentukan badan usaha milik petani;
- 8) Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 18 Nopember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bahwa UPT Dinas Pertanian terdiri dari UPT Kebun Bibit Pertanian.

1. Susunan Organisasi UPT Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala UPT
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Uraian Tugas Kepala UPT Kebun Bibit Pertanian :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- b. Mengkaji, menguji dan membimbing penerapan standar pembibitan;
- c. Mengkaji standard dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi bibit tanaman perkebunan;
- d. Menyusun rencana program pembibitan tanam perkebunan;



- e. Melaksanakan kegiatan perbenihan/pembibitan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perbenihan / bibit di wilayahnya dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan yang ada diwilayahnya dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam rangka penerapan teknologi perbenihan dan pembibitan;
- i. Melayani masyarakat petani dan kelompok dalam membantu pelaksanaan pembibitan / penangkaran;
- j. Melaksanankan tugas pemeliharaan dan perawatan secara rutin terhadap Kebun Bibit yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas;
- l. Melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawah wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan pelatihan perbenihan / pembibitan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian terdiri atas jabatan fungsional :

- a. Penyuluh Pertanian
- b. Analis Ketahanan Pangan;
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- d. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- e. Jabatan fungsional lainnya.

Tugas jabatan fungsional :

- a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - 2) melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - 3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;



4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;

2) melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

3) melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan

4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;

2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan

3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;

2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;

3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan

4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Jabatan Fungsional Lainnya

Balai Penyuluhan Petanian (BPP) yang merupakan unit kerja yang dipimpin oleh seorang kepala, meliputi :

1) BPP Pematang Sijonam

2) BPP Sei Rejo



- 3) BPP Berohol
- 4) BPP Dolok Masihul
- 5) BPP Tanjung Beringin
- 6) BPP Serba Jadi

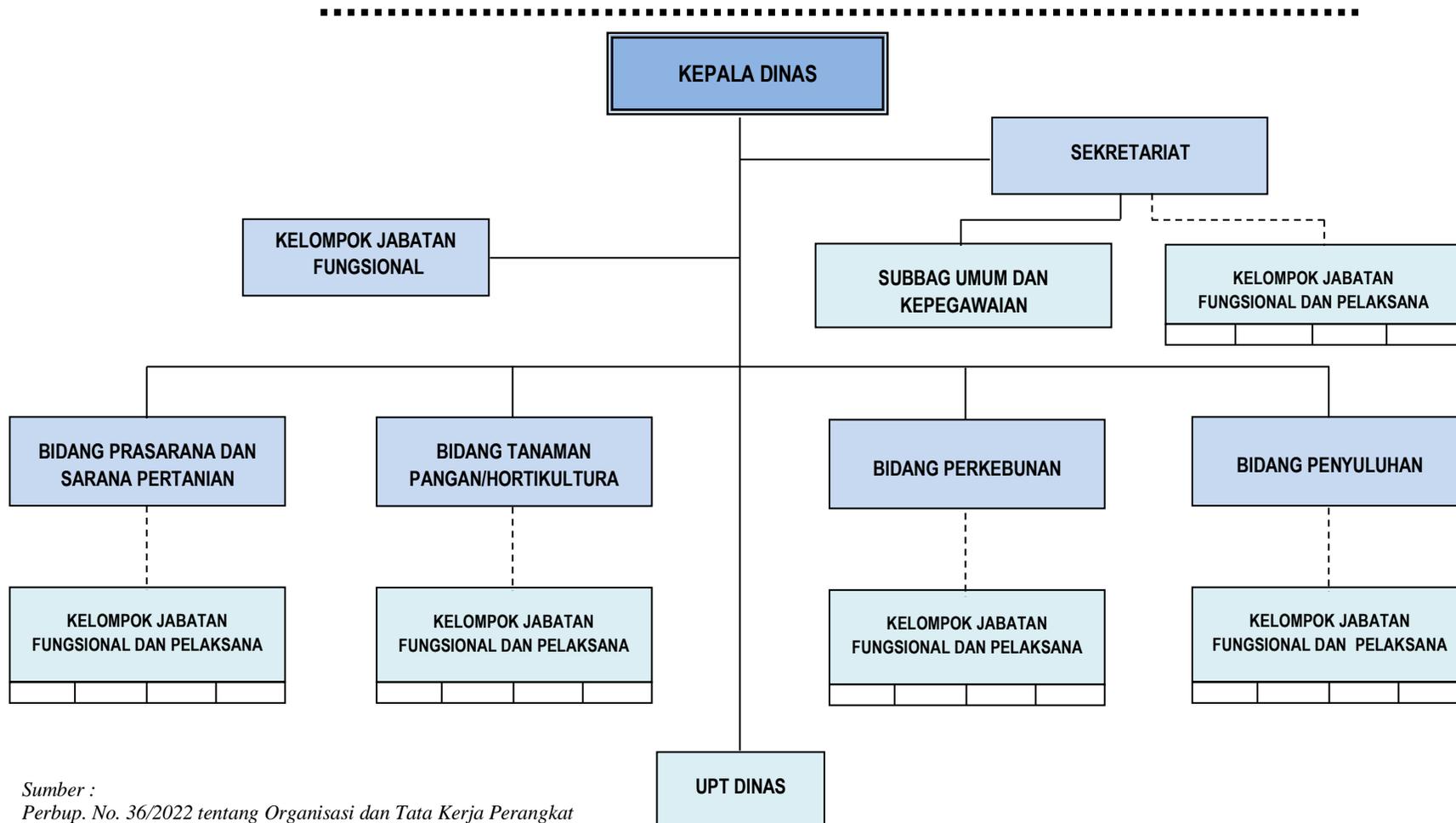
2.3.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan, spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai maka Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok jabatan fungsional
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Sumber :
Perbup. No. 36/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kab. Serdang Bedagai



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pertanian

Pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pertanian.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian

Dukungan petugas/pegawai Dinas Pertanian yang merupakan unsur penggerak dan pembina pembangunan pertanian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai

Uraian		Kab	Ka. UPTD/ kebun bibit	Ka.BPP	Kec	Penjaga Malam	Kebersihan	Total
PNS/CPNS	Struktural	15	1	-	-	-	-	16
	Fungsional tertentu	13	-	6	33	-	-	52
PNS Prop (PHP & BPSB)	PNS	-	-	-	5	-	-	5
	PHP-TL	-	-	-	5	-	-	5
P3K		-	-	-	72	-	-	72
Tenaga Kontrak/THL		35	1	-	6	2	1	45
PPL-THL Propinsi		-	-	-	5	-	-	5
Total		63	2	6	126	2	1	200

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pertanian sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) orang
2. Eselon III : 5 (lima) orang
3. Eselon IV : 2 (dua) orang
4. Pejabat fungsional : 124 (Seratus dua puluh empat) orang
5. Staf (Non Eselon ASN) : 8 (Delapan)
6. Staf non ASN : 45 (Empat puluh lima).



Tabel 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	II	1	-	1	
2.	III	5	-	5	
3.	IV	2	-	2	
4.	Pejabat Fungsional	124	-	124	
5.	Staf (Non Eselon ASN)	8	45	53	
	Jumlah	140	45	185	

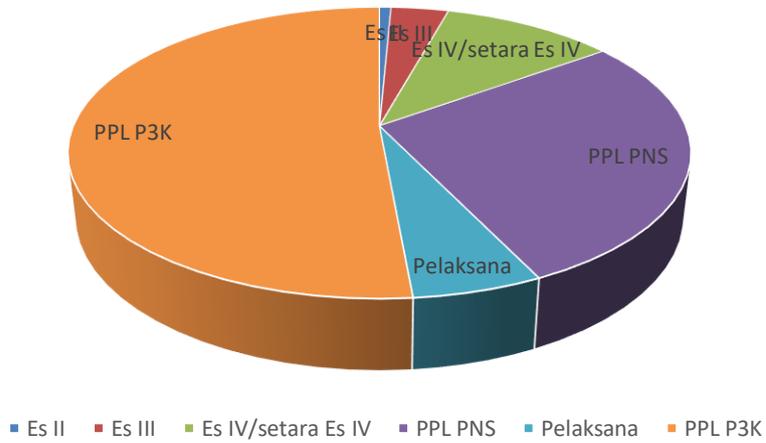
Komposisi pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai

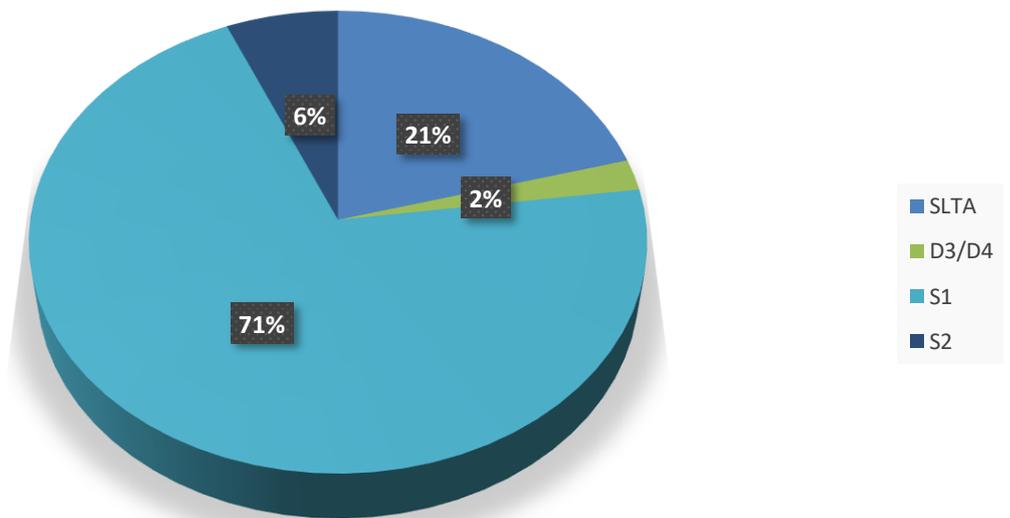
Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			Umur	
Gol	Jlh	Nama Jabatan	Jlh	Tingkat				Jlh	Jenis		Jlh	>50 thn	30 – 50 thn
				SLTA	D3/D4	S1	S2		P	L			
-	1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
IV/b	1	Sekretaris/	5	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
IV/a	2	Kepala		-	-	-	2	2	-	2	2	1	1
III/d	2	Bidang		-	-	1	1	2	-	2	2	-	2
IV/a	2	Kasubbag/	15	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
III/d	10	Fungsional		-	-	11	-	11	5	6	11	6	5
III/c	3	Tertentu Penyetaraan		-	-	3	-	3	-	3	3	-	3
IV/a	5	Fungsional	39	-	-	4	1	5	1	4	5	4	1
III/d	12	Tertentu		-	-	11	1	12	5	7	12	8	4
III/b	7			-	-	7	-	7	5	2	7	-	7
III/a	7			1	-	6	-	7	3	4	7	-	7
II/d	1				1			1	1		1		1
II/c	1			1				1	0	1	1	1	-
II/b	6			6				6	-	6	6	-	6
III/d	7	Pelaksana	8	-	-	6	1	7	2	5	7	1	6
III/a	1			-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
V	21	Fungsional	72	21				21	20	1	21	7	14
VII	2	Tertentu			2			2		2	2	1	1
IX	49	(P3K)				49		49	41	8	49	16	33
Jml	140		140	29	3	99	9	140	63	52	140	46	94



Gambar 2.2.
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

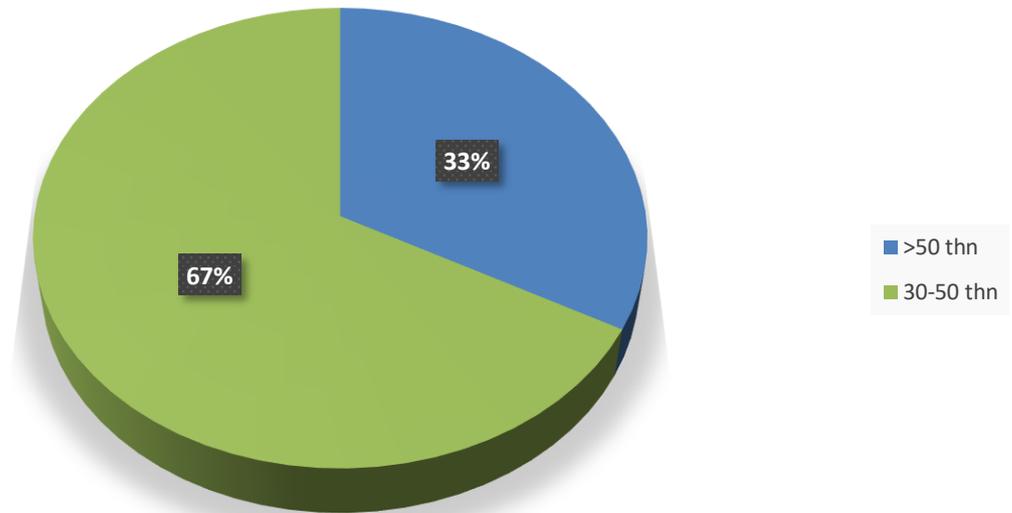


Gambar 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan





Gambar 2.4
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan Usia



Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena belum semua bidang memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal S1 dan S2 sebanyak 77,14%. Berdasarkan komposisi umur, sumber daya manusia pada Dinas Pertanian hampir seimbang antara rentang umur yang produktif 30 – 50 tahun (67,14%) dan rentang umur > 50 tahun (32,86%).

2.2.2. Potensi Sumber Daya Manusia Petani

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. SDM petani yang merupakan pelaksana utama pembangunan pertanian dari hasil pencacahan sensus pertanian tahun 2023 tahap I dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jumlah rumah tangga usaha pertanian 96.982 RT (59,67%) dari total rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebanyak 162.534 RT. Jumlah rumah tangga petani sebanyak 93.941 RT

Menurut subsektor :

- tanaman pangan : 50.122 RT
- perkebunan : 31.718 RT



- peternakan : 36.316 RT
- hortikultura : 20.176 RT
- jasa pertanian : 867 RT
- petani hutan : 242 RT
- penangkapan ikan : 3.168 RT
- budidaya ikan : 1.358 RT
- jumlah petani : 100.289 orang

Dilihat dari jumlah rumah tangga usaha pertanian, sub sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dan sangat dominan.

Jumlah petani gurem (luas lahan pertanian < 0.5 ha) sebanyak 70.369 orang (74,12%) dari pengguna lahan pertanian 94.939 orang.

- Perusahaan pertanian berbadan hukum 38 unit, usaha pertanian lainnya 20 unit
- Berdasarkan kelembagaan, kelompok yang ada terdiri dari :

1. Kelompok tani (1.767 kelompok),

a. berdasarkan kelas kelompok terdiri atas :

- Kelompok pemula : 1.306 kelompok
- Kelompok lanjut : 419 kelompok
- Kelompok madya : 33 kelompok
- Kelompok utama : 0 kelompok

b. Berdasarkan sub sektor terdiri atas :

- Kelompok pangan : 1.300 kelompok
- Kelompok ternak : 214 kelompok
- Kelompok perkebunan/kehutanan : 104 kelompok
- Kelompok wanita tani : 69 kelompok

2. Gapoktan : 215 kelompok

3. Kelembagaan P3A/GP3A :

- P3A : 91 kelompok
- GP3A : 26 kelompok

4. Kelompok penangkar :

- Penangkar tan. pangan (padi dan kedelai) : 15 kelompok
- Penangkar tanaman perkebunan : 9 kelompok



5. Stakeholder pendukung

- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
- Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)
- Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)

2.2.3. Potensi Sumberdaya Lahan dan Iklim

Luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai seluas 1.900,22 km². Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari beberapa wilayah agroekosistem yaitu agrosistem laut/pantai, sawah, lahan kering dataran rendah, dataran kering dataran tinggi. Setiap agrosistem memiliki potensi dan karakteristik wilayah masing-masing yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki iklim tropis. Iklim di Kabupaten Serdang Bedagai dapat di bagi atas dataran rendah dan dataran menengah, rata-rata curah hujan sebesar 173,58 mm/bulan. Bulan kemarau secara umum terdapat pada bulan Januari-Juni sedangkan musim penghujan berada bulan Agustus-Desember. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan Oktober. Suhu dan kelembaban relatif mempunyai kesamaan antara dataran, sehingga potensi daerah sebagai sentra pertanian mengusahakan komoditi yang relatif sama.

Distribusi hujan relatif merata, hal ini dapat meningkatkan pengoptimalan intensitas tanam, selain itu terdapat banyak sumber-sumber mata air berupa 24 sungai.

Secara Geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada 3o01'2,5" Lintang Utara-3 o 46'33" Lintang Utara dan 98o44'22" Bujur Timur-99o19'01" Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-500 mm. Berdasarkan pelerengan dapat dirinci sebagai berikut: < 2 % (datar seluas 71.302,15 ha tersebar hampir disemua kecamatan kecuali Bintang Bayu, Dolok Merawan, Kotarih dan Silinda, 2-8% (agak berombak seluas 76.925,78 ha tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Pantai Cermin, Perbaungan, Sei Bamban, Silinda dan Tanjung Beringin dan > 40 % (lahan berelief bergunung) seluas 2.185,86 ha di Kecamatan Sipispis, yang merupakan area yang tidak direkomendasikan sebagai wilayah budidaya karena rawan menimbulkan bencana.

Peruntukan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 s/d 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Luas baku lahan sawah

NO	Tahun	Berpengairan				Jumlah	Tidak Berpengairan				Jumlah	Total
		Irigasi Teknis	Irigasi 1/2 Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa Non PU		Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Polder dan lainnya		
1	2018	-	21.910	5.636	5.201	32.747	5.687	260	13	-	5.960	38.707
2	2019	-	22.372	3.118	4.752	30.242	5.572	354	-	-	5.926	36.168
3	2020	-	23.793	-	-	23.793	4.026	354	-	-	4.380	28.173
4	2021	-	26.317	-	-	26.317	4.287	644	-	-	4.931	31.248
5	2022	-	24.084	-	-	24.084	4.211	603	-	-	4.814	28.898

Tabel 2.5. Luas baku lahan bukan sawah

No	Tahun	Pekarangan DII	Tegal/ Kebun	Ladang /Huma	Padang Rumput	Smt Tdk Diusahakan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	Rawa Tdk Ditanam	Tambak	Kolam/ Tebat	Total
1	2018	8.351	27.277	6.204	25	902	3.401	3.858	88.715	10.370	732	847	170	150.852
2	2019	9.781	30.619	4.039	25	902	3.401	3.858	88.715	10.302	732	847	170	153.391
3	2020	9.781	38.949	5.553	25	902	3.401	3.858	88.715	10.302	732	847	170	163.235
4	2021	9.871	33.441	4.369	-	945	3.391	3.858	89.269	10.944	732	847	170	157.837
5	2022	10.045	38.484	4.369	-	945	3.384	3.858	86.861	10.923	732	847	170	160.619

Tabel 2.6. Luas Lahan Perkebunan Rakyat

No.	Tahun	Kelapa Sawit	Karet	Kakao	Kelapa	Pinang	Kemiri	Aren
1	2018	13.028,70	9.901,28	1.186,55	2.135,10	277,85	65,40	47,25
2	2019	13.225,99	10.815,10	1.157,48	2.097,83	283,79	63,70	47,75
3	2020	11.996,70	9.154,10	1.201,80	2.046,30	285,25	61,00	48,55
4	2021	12.517,30	8.899,45	1.200,50	2.049,50	295,65	64,00	54,65
5	2022	12.623,97	8.717,16	1.172,13	2.021,60	295,65	64,00	54,65

Tabel 2.7. Luas Lahan Perkebunan Negara, Swasta dan Daerah Tahun 2022

No	Komoditas	Kepemilikan				TOTAL DAERAH
		Rakyat	Negara (PTPN)	Swasta Nasional	Swasta Asing	
1	Karet	8.717,16	6.495	66,17	3.926,60	19.204,93
2	Kelapa Sawit	12.623,97	26.956,93	17.405,10	4.617,07	61.603,07
3	Kakao	1.172,13	-	-	-	1.172,13
4	Kelapa	2.021,60	-	-	-	2.021,60
5	Pinang	295,65	-	-	-	295,65
6	Kemiri	64,00	-	-	-	64,00
7	Aren	54,65	-	-	-	54,65
TOTAL		24.949,16	33.451,93	17.471,27	8.543,67	84.416,03

2.2.4. Potensi Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja untuk pengembangan pertanian cukup besar. Menurut data BPS jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebanyak 667.998 jiwa, diantaranya merupakan angkatan kerja usia ≥ 15 tahun ke atas sebanyak 292.872 orang dan dari angkatan kerja tersebut yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 106.655 jiwa.

2.2.5. Potensi Ekonomi

Produk-produk tanaman pangan dan hortikultura pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk panen segar dengan mutu yang relatif rendah, sehingga sangat potensi untuk meningkatkan nilai tambah melalui penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen.



2.2.6. Jumlah Asset

Tabel 2.8. Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Pertanian Keadaan per Juli 2023

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)
A.	ASET LANCAR	
	Persediaan	42.522.500
B.	ASET TETAP	
	1. Tanah	2.026.226.890
	2. Peralatan dan Mesin	10.865.233.730
	3. Gedung dan Bangunan	11.353.422.00
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.754.009.320
	5. Aset Tetap Lainnya	16.938.180
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
	7. Akumulasi Penyusutan	46.174.504.660
C.	ASET LAINNYA	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
	2. Aset Tidak Berwujud	
	3. Aset Lain-lainnya	3.729.580.000
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	

2.3 Kinerja Pelayanan

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.9 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					̄ Rasio Capaian	x Pertumbuhan Capaian (%)	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5			
III.2	PERTANIAN																					
	<u>Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD</u>																					
1	Produksi Padi (ton)	-	-	-	446.880	454.480	463.600	386.749	406.086	494.469,00	350.310,85	386.749	363.623,35	431.378	110,65	77,08	83,42	94,02	106,23	94,28	-	1,5
2	Produksi Jagung (ton)	-	-	-	10.723	11.007	11.269	31.543	33.120	23.774,00	24.108,64	31.543	8.354,98	36.084	221,71	219,03	279,91	26,49	108,95	171,22	-	72,7
3	Produksi Ubi Kayu (ton)	-	-	-	514.523	517.842	521.128	638.004	669.904	478.935,00	627.014,14	638.004	534.684	741.369	93,08	121,08	122,43	83,81	110,67	106,21	-	13,8
4	Produksi kelapa sawit (ton)	-	-	-	129.888	131.200	135.258	142.377,10	142.802,23	183.523,60	151.409,31	142.377,10	146.716,80	146.372	141,29	115,40	105,26	103,05	102,50	113,50	-	5,2
5	Produksi karet (ton)	-	-	-	15.965	16.735	8.226	8.658,74	8.684,71	16.885,00	15.150,91	8.658,74	8.915,29	8.746	105,76	90,53	105,26	102,96	100,71	101,05	-	13,0
6	Produksi kakao (ton)	-	-	-	1.126	1.176	1.194	645,63	647,57	1.362,38	800,02	800,02	668,49	659	120,99	68,03	67,00	103,54	101,77	92,27	-	14,8
7	Produksi kelapa (ton)	-	-	-	2.475	2.493	2.495	2.223,72	2.230,39	4.147,78	2.241,83	2.241,83	2.294,10	2.268	167,59	89,92	89,85	103,16	101,69	110,44	-	11,2
8	Produksi Aren (ton)				-	-	-	17,4	17,45	-	-	-	17,95	8	-	-	-	103,16	45,85	74,50	-	55,4
9	Produksi sayur-sayuran (ton)	-	-	-	9.453	9.642	9.835	6.756	9.223	12.543,00	5.776,10	3.752	8.345	9.732	132,69	59,91	38,15	123,52	105,52	91,96	-	12,5
10	Produksi buah-buahan (ton)	-	-	-	45.698	47.775	48.492	62.001	44.784	52.295,00	10.847,80	73.466	108.200	47.432	114,44	22,71	151,50	174,51	105,91	113,81	-	122,3



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					x̄ Rasio Capaian	x̄ Pertumbuhan Capaian (%)	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5			
11	Produksi tanaman obat-obatan/biofarmaka (ton)	-	-	-	9,99	10,19	10,39	-	-	8,38	1,28	1,958	-	-	83,87	12,54	18,85	-	-	38,42	-	15,8
12	Produktifitas Padi (ton/ha)	-	v	-	5,88	5,98	6,10	6,22	6,53	5,86	5,87	6,22	6,07	6,3	99,68	98,16	101,97	97,59	96,48	98,77	-	1,9
13	Produktifitas Jagung (ton/ha)	-	-	-	4,91	5,04	5,16	3,77	3,77	5,05	5,08	3,77	3,77	4	102,93	100,79	73,06	100,00	106,10	96,58	-	4,8
14	Produktifitas Ubi Kayu (ton/ha)	-	-	-	40,52	40,78	41,04	47,46	49,83	44,96	46,54	47,46	47,46	50	110,96	114,12	115,64	100,00	100,34	108,21	-	2,7
15	Produktifitas kelapa sawit (kg/ha)	-	-	-	14.765,71	14.800,00	14.950,85	13.694,62	13.735,71	16.788,80	12.953,63	13.014,99	14.112,04	14.101	113,70	87,52	87,05	103,05	102,66	98,80	-	3,5
16	Produktifitas karet (kg/ha)	-	-	-	1.015,10	1.026,63	1.031,01	-	-	1.509,11	950,00	1.548,93	-	-	148,67	92,54	150,23	-	-	130,48	-	13,0
17	Produktifitas kakao (kg/ha)	-	-	-	986,02	1.017,94	1.069,95	-	-	1.251,38	830,00	746,75	-	-	126,91	81,54	69,79	-	-	92,75	-	21,9
18	Produktifitas kelapa (kg/ha)	-	-	-	1.183,00	1.216,01	1.234,83	1.160,18	1.163,66	1.471,00	1.129,47	1.129,47	1.196,90	1.191	124,34	92,88	91,47	103,17	102,35	102,84	-	4,4
19	Luas tanam padi (ha)	-	-	-	-	-	-	56.889	60.889	-	-	-	63.335	61.328	-	-	-	111,33	100,72	106,03	-	3,2
20	Luas tanam jagung (ha)	-	-	-	-	-	-	4.689	4.739	-	-	-	1.603	6.906	-	-	-	34,19	145,73	89,96	-	330,8
21	Luas tanam ubi kayu (ha)	-	-	-	-	-	-	10.772	10.822	-	-	-	11.260	16.166	-	-	-	104,53	149,38	126,96	-	43,6
22	Luas tanam sayur-sayuran (ha)	-	-	-	-	-	-	866	946	-	-	-	927	953	-	-	-	107,04	100,74	103,89	-	2,8



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					̄ Rasio Capaian	̄ Pertumbuhan capaian (%)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5		
23	Luas tanam buah-buahan (ha)	-	-	-	-	-	-	3.460,05	3.806,05	-	-	-	1.959	3.926	-	-	-	56,62	103,15	79,88	100,4
24	Luas panen padi (ha)	-	-	-	-	-	-	62.054	66.054	-	-	-	59.905	66.061	-	-	-	96,54	100,01	98,27	10,3
25	Luas panen jagung (ha)	-	-	-	-	-	-	8.748	8.798	-	-	-	2.215	8.801	-	-	-	25,32	100,03	62,68	297,3
26	Luas panen ubi kayu (ha)	-	-	-	-	-	-	13.491	13.541	-	-	-	11.266	14.872	-	-	-	83,51	109,83	96,67	32,0
27	Luas panen sayur-sayuran (ha)	-	-	-	-	-	-	861	941	-	-	-	1.036	1.008	-	-	-	120,33	107,12	113,72	2,7
28	Luas panen buah-buahan(ha)	-	-	-	-	-	-	2.768,04	3.044,84	-	-	-	2.556	3.224	-	-	-	92,34	105,88	99,11	26,1
29	Produksi padi organik (ton)	-	-	-	-	-	-	137	169	-	-	-	160,97	343	-	-	-	117,50	202,96	160,23	113,1
30	Produksi buah organik (ton)	-	-	-	-	-	-	230	280	-	-	-	-	536	-	-	-	-	191,43	191,43	-
31	Produksi penangkar padi(ton)	-	-	-	-	-	-	1.551	1.651	-	-	-	1.154	1.701	-	-	-	74,40	103,03	88,72	47,4
32	Produksi bawang merah(ton)	-	-	-	-	-	-	300	400	-	-	-	423	401	-	-	-	141,00	100,25	120,63	5,2
33	Produksi cabe merah (ton)	-	-	-	-	-	-	600	800	-	-	-	1.367	1.896	-	-	-	227,83	237,00	232,42	38,7
34	Luas tanam padi organik (ha)	-	-	-	-	-	-	47	52	-	-	-	45	343	-	-	-	95,74	659,62	377,68	662,2
35	Luas tanam buah organik (ha)	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	19	536	-	-	-	380,00	8933,33	4656,67	2.721,1
36	Luas tanam penangkar padi (ha)	-	-	-	-	-	-	514	534	-	-	-	524	1.701	-	-	-	101,95	318,54	210,24	224,6
37	Luas tanam bawang merah (ha)	-	-	-	-	-	-	40	80	-	-	-	51	401	-	-	-	127,50	501,25	314,38	686,3
38	Luas tanam cabe merah (ha)	-	-	-	-	-	-	120	160	-	-	-	131	1.896	-	-	-	109,17	1185,00	647,08	1.347,3



Rasio capaian kinerja produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu) selama periode 2018 s/d 2022 sudah dapat mencapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata rasio capaian produksi di atas 90, tetapi bila ditinjau dari laju pertumbuhan capaian indikator kinerja produksi tanaman pangan mengalami peningkatan kecuali produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,5%. Penurunan produksi padi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu antara lain berkurangnya luas baku lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian (luas baku lahan sawah tahun 2018 seluas 38.707 h, 2022 seluas 28.898 ha), hal ini dapat dilihat juga dari rata-rata luas tanam padi dari tahun 2018 – 2022 menurun sebesar 53,2% dan masih rendahnya rata-rata produktivitas padi di beberapa kecamatan.

Rata-rata rasio capaian kinerja tanaman hortikultura meningkat selama 5 tahun terakhir, tetapi rata-rata laju pertumbuhan produksi tanaman obat-obatan menurun sebesar 15,8%, hal ini disebabkan karena tanaman obat-obatan merupakan komoditas sekunder yang dibudidayakan di spot-spot lahan kering dan pekarangan sehingga pengelolaannya belum intensif.

Rata-rata rasio capaian kinerja produksi tanaman perkebunan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata laju pertumbuhan produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena teknis budidaya pada perkebunan rakyat yang diusahakan oleh petani belum sepenuhnya mengikuti sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis karena mahalnya harga pupuk dan pestisida, saat ini pemerintah tidak mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan. Selain itu adanya serangan hama penyakit menyebabkan produktivitas menurun.

Penurunan laju pertumbuhan produktivitas jagung dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain karena petani masih membudidayakan jagung sebagai komoditas selingan yang ditanam di lahan-lahan marginal sehingga teknis budidaya sesuai kaidah belum diaplikasikan secara maksimal.

Dari hasil rata-rata laju pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan menurun kecuali karet, perlu diterapkan kebijakan dan strategi dalam budidaya sehingga pengembangan dan pengelolaannya perlu lebih fokus dan intensif lagi.



Tabel. 2.10 (T-C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2018-2022
 berdasarkan Sumber Dana

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
DAU	14.417.724.985	18.919.817.292	15.467.037.214	19.964.313.075	28.586.777.455	13.320.226.554	18.158.830.448	14.873.409.870	18.016.204.035	27.607.090.239	0,92	0,96	0,96	0,90	0,97	21,31	23,15
DAK	4.225.107.000	3.566.000.000	1.508.300.000	1.041.500.000	515.100.000	4.212.907.000	3.517.001.000	923.888.000	1.041.500.000	515.100.000	1,00	0,99	0,61	1,00	1,00	-38,70	- 32,02
DBHCHT	-	-	-	-	52.096.502	-	-	-	-	52.096.502	-	-	-	-	1,00	-	-



Tabel. 2.11 (T-C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2018-2022 berdasarkan Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.084.300.000	1.177.613.556	1.097.508.001	-	-	1.054.547.868	1.142.357.645	1.072.512.825	-	-	0,97	0,97	0,98	-	-	0,90	1,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	867.050.000	480.029.892	123.013.500	-	-	812.503.080	456.082.405	122.645.618	-	-	0,94	0,95	1,00	-	-	-59,51	-58,49
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	24.000.000	-	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-
5	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	75.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air	4.091.237.000	4.439.736.000	2.128.100.000	-	-	4.073.980.000	4.385.867.000	1.985.879.000	-	-	1,00	0,99	0,93	-	-	-21,77	-23,53
7	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan/Jalan	2.040.255.000	3.406.000.000	2.500.000.000	-	-	1.980.676.000	3.387.477.500	2.496.124.300	-	-	0,97	0,99	1,00	-	-	20,17	22,36
8	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	447.120.000	248.167.719	-	-	-	283.592.600	244.282.400	-	-	-	0,63	0,98	-	-	-	-44,50	-13,86
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	41.430.000	-	-	-	-	41.430.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-



NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	510.505.000	-	-	-	-	482.205.000	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	197.500.000	149.653.300	13.530.000	-	-	148.770.000	108.016.300	13.530.000	-	-	0,75	0,72	1,00	-	-	-57,59	-57,43
13	Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan	309.050.000	324.014.055	149.934.600	-	-	263.198.750	286.408.700	145.093.300	-	-	0,85	0,88	0,97	-	-	-24,44	-20,26
14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	480.150.000	379.616.911	134.833.700	-	-	272.779.850	343.700.000	134.786.250	-	-	0,57	0,91	1,00	-	-	-42,71	-17,39
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	794.755.000	726.823.094	363.304.850	-	-	746.634.000	661.067.514	343.911.600	-	-	0,94	0,91	0,95	-	-	-29,28	-29,72
16	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	789.070.000	682.543.675	-	-	-	786.870.672	663.507.076	-	-	-	1,00	0,97	-	-	-	-13,50	-15,68
17	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	574.040.000	-	-	-	-	533.806.035	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
18	Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	459.580.000	-	-	-	-	340.978.000	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-



NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
19	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	-	-	278.125.900	-	-	-	-	277.259.900	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	925.273.380	967.420.600	-	-	-	906.854.280	474.472.720	-	-	-	0,98	0,49	-	-	4,56	-47,68
21	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pertanian/Peternakan	-	475.200.241	136.927.000	-	-	-	458.317.294	130.060.100	-	-	-	0,96	0,95	-	-	-71,19	-71,62
22	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	189.855.000	-	-	-	-	128.870.000	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	14.769.926.075	14.347.668.684	-	-	-	13.087.871.079	13.607.005.245	-	-	-	0,89	0,95	-	-
24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	1.061.556.200	1.080.985.920	-	-	-	935.757.500	1.042.151.987	-	-	-	0,88	0,96	-	-
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	4.461.100.000	11.865.270.000	-	-	-	4.375.630.000	11.798.822.580	-	-	-	0,98	0,99	-	-
26	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	160.366.700	257.718.340	-	-	-	151.164.000	253.188.565	-	-	-	0,94	0,98	-	-
27	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-	4.732.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-
28	Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	548.132.100	1.602.331.013	-	-	-	507.281.456	1.473.118.364	-	-	-	0,93	0,92	-	-



Tabel. 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2018-2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
1	Program mendukung Administrasi Perkantoran	2.039.850.000	1.657.643.448	1.220.521.501	14.769.926.075	14.347.668.684	1.880.550.948	1.617.440.050	1.195.158.443	13.087.871.079	13.607.005.245	0,92	0,98	0,98	0,89	0,95	265,54	239,74
2	Program mendukung Kinerja OPD	10.735.096.036	11.757.032.413	6.862.035.690	6.235.887.000	14.806.305.273	9.955.324.943	11.445.502.102	6.129.991.210	5.969.832.956	14.567.281.496	0,93	0,97	0,89	0,96	0,98	-16,06	27,48



Dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan teknis (kinerja OPD) rata-rata laju pertumbuhannya menurun sebesar 16,06% dari tahun 2018 sampai 2023, hal ini disebabkan karena perubahan OTK dan alokasi anggaran DAK mengalami penurunan sebesar 38,70%, sedangkan anggaran mendukung administrasi perkantoran rata-rata lajunya meningkat sebesar 265,54% hal ini disebabkan karena bertambahnya ASN pada Dinas Pertanian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 73 orang pada tahun 2021.

Sebelum diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi perubahan nomenklatur program maupun jumlah program yang diadopsi oleh Dinas Pertanian setiap tahunnya, hal ini mempengaruhi alokasi anggaran setiap program.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor pertanian merupakan bagian dari sektor riil yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai, karena sebagai wilayah agraris menjadi tulang punggung perekonomian. Namun kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Penduduk di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya, terutama industri manufaktur, keuangan, dan perdagangan; walaupun pendapatan bervariasi menurut subsektor atau kelompok usaha di masing-masing sektor tersebut.

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja pada Dinas Pertanian menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:



1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- ✓ Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membangun sektor pertanian yang tercantum dalam misinya
- ✓ Adanya dukungan SDA yang sesuai untuk pengembangan usaha tani
- ✓ Koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah kabupaten dan stakeholders terkait telah terjalin dengan baik
- ✓ Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan telah berjalan dengan baik
- ✓ Kelembagaan penyuluh pertanian telah terbentuk
- ✓ Adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah dalam bidang pertanian

b. Kelemahan

- ✓ Jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi masih belum optimal
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja
- ✓ Data yang tersedia belum akurat untuk perencanaan dan evaluasi
- ✓ Belum semua SOP sesuai kebutuhan tersedia dan dilaksanakan
- ✓ Koordinasi lintas bidang terkait pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- ✓ Kinerja petugas lapangan dalam pembinaan dan pendampingan kepada petani masih kurang optimal
- ✓ Belum berfungsinya UPT yang ada dalam mendukung kinerja
- ✓ Belum rampungnya data luas baku lahan sawah di Kabupaten Serdang Bedagai
- ✓ Belum rampung tata batas kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai



2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- ✓ Tersedianya teknologi pertanian yang semakin berkembang dan dapat diadopsi
- ✓ Masih terbukanya potensi untuk peningkatan produksi dan produktivitas
- ✓ Jumlah SDM yang cukup besar terlibat dalam sektor pertanian
- ✓ Masih besarnya permintaan pasar terhadap produk-produk pertanian seiring meningkatnya jumlah penduduk
- ✓ Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak ke tiga (akademisi, korporasi)
- ✓ Adanya dukungan baik anggaran dan program maupun SDM dari pemerintah provinsi maupun pusat
- ✓ Adanya tren “*Back to Nature / Go Organic*” akan membuka pasar baru untuk pengembangan pertanian organik
- ✓ Potensi hasil perkebunan yang cukup besar
- ✓ Tingginya peluang pasar dan investasi untuk hasil-hasil perkebunan
- ✓ Teknologi informasi/media yang mendukung untuk sarana komunikasi dan edukasi

b. Tantangan

- ✓ Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, tersebarinya lokasi budidaya khususnya hortikultura dalam skala yang kecil, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.
- ✓ Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan/pemenuhan sarana prasarana khususnya pengelolaan prasarana pengairan/irigasi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan



daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil. Selain itu diperlukan juga penyediaan prasarana berupa jalan usahatani, balai informasi dan promosi pertanian dan pasar-pasar bagi komoditas produk-produk pertanian.

- ✓ Tantangan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.
- ✓ Tantangan terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian sesuai keinginan konsumen Pengembangan daya saing terutama pengembangan produk olahan. Selain itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.
- ✓ Tantangan untuk mengembangkan akses petani terhadap sumber permodalan ke depan adalah bagaimana memfasilitasi antara lembaga perbankan yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan sekaligus memberdayakan usaha-usaha mikro kecil di perdesaan.
- ✓ Tantangan yang harus dihadapi terhadap ketahanan pangan dan pemenuhan pangan adalah peningkatan jumlah penduduk. Sehingga perlu diterapkan pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen.
- ✓ Tantangan ke depan yang harus dihadapi kondisi berkurangnya minat pemuda terhadap pertanian yang semakin menurun adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok pemuda untuk dapat beraktivitas di sektor pertanian *off-farm*. Beberapa bidang usaha yang perlu dikembangkan untuk memotivasi keikutsertaan pemuda dalam bidang pertanian adalah usaha penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, usaha



penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian dan pelayanan jasa alsintan.

- ✓ Tingginya ancaman serangan hama dan penyakit serta anjloknya harga.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian berasal dari permasalahan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai yang memberikan pengaruh terhadap kinerja pembangunan sektor pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan hasil review RPJMD periode 2016 – 2022 capaian indikator tujuan dan sasaran yang terkait dengan Dinas Pertanian sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan*

Uraian	Sat.	Capaian (Tahun)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rp	8.720,2	9.425,28	10.095,38	10.651,38	11.134,01	11.938,50	13.558,45
Laju pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan	%		8,09	7,11	5,51	4,53	7,23	13,57
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	39,43	39,10	38,84	38,10	38,93	39,25	40,45



Perkembangan Data PDRB pada sektor pertanian dari tahun 2016 – 2020

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Subsektor	Capaian (Tahun) (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanaman Pangan	2.401.435,50	2.480.130,60	2.731.667,90	2.884.818,80	2.935.153,40
Tanaman Hortikultura Semusim	11.025,20	11.677,60	12.442,40	15.533,70	14.518,30
Tanaman Hortikultura dan Lainnya	449.502,90	471.273,20	480.973,80	504.936,60	517.662,80
Perkebunan	3.525.793,80	3.884.838,10	4.028.838,10	4.314.596,00	4.727.148,10
Jasa Pertanian dan Perburuan	74.784,90	81.166,80	84.666,80	92.911,10	94.309,60

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

Subsektor	Capaian (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanaman Pangan	1.708.020,70	1.790.289,30	1.877.317,30	1.966.684,50	1.927.651,60
Tanaman Hortikultura Semusim	7.716,80	8.117,00	8.536,60	8.943,30	9.416,80
Tanaman Hortikultura dan Lainnya	363.675,50	378.312,10	380.543,40	384.067,00	383.356,50
Perkebunan	3.403.307,20	3.585.322,60	3.799.810,90	4.084.343,80	4.276.358,90
Jasa Pertanian dan Perburuan	53.341,60	54.460,80	54.244,00	56.102,00	56.654,30



Tabel 3.4
Kontribusi PDRB berdasarkan Sub Sektor

Subsektor	Capaian (Tahun) (%)					Laju (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Tanaman Pangan	10,86	10,29	10,51	10,32	10,26	-1,37
Tanaman Hortikultura Semusim	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0
Tanaman Hortikultura dan Lainnya	2,03	1,96	1,85	1,81	1,81	-2,81
Perkebunan	15,94	16,12	15,50	15,50	16,53	0,98
Jasa Pertanian dan Perburuan	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	-0,74

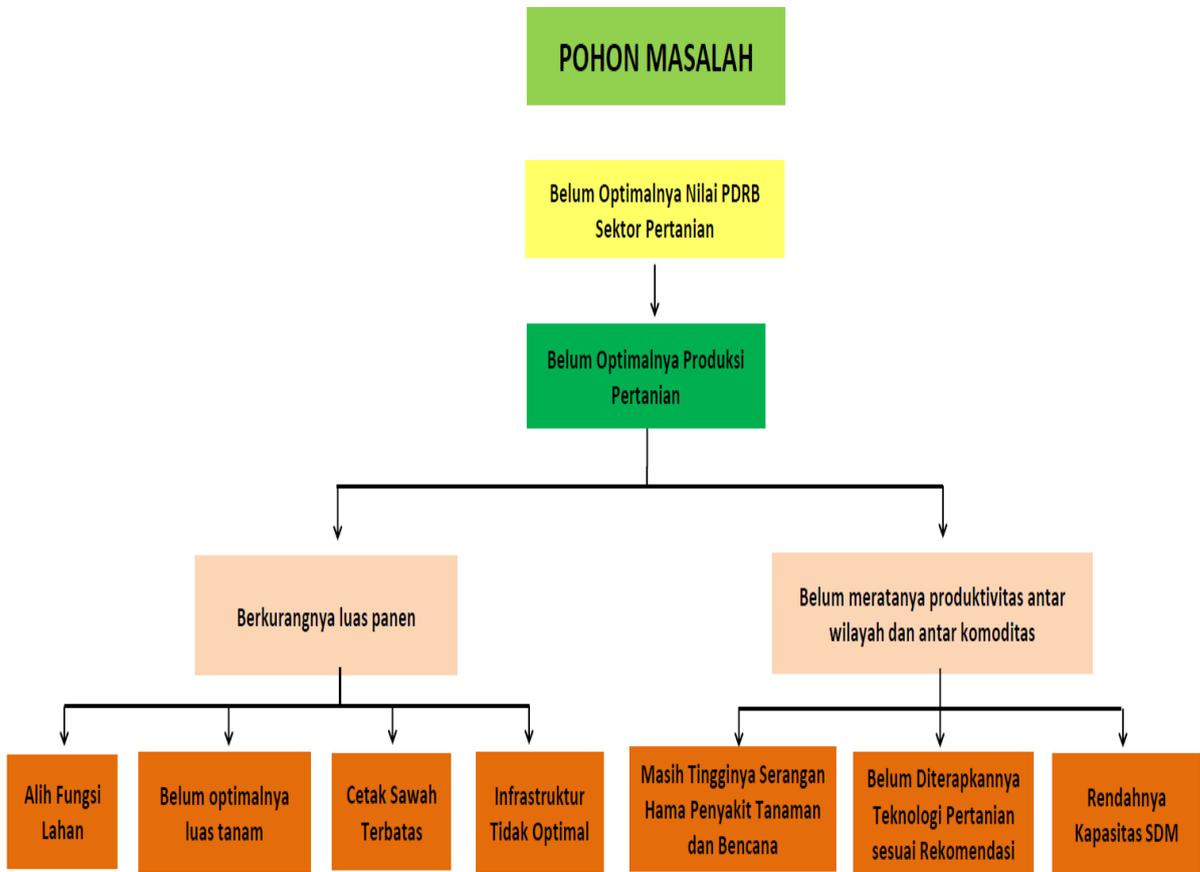
Berdasarkan PDRB atas harga berlaku, nilai PDRB setiap sub sektor pertanian meningkat tetapi bila dilihat dari persentase kontribusi PDRB pada tiap sub sektor lajunya mengalami penurunan kecuali sub sektor perkebunan. Laju pertumbuhan kontribusi PDRB sektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Hal ini disebabkan adanya dukungan perkebunan besar baik BUMN maupun swasta yang cukup luas di Kabupaten Serdang Bedagai \pm 73% dari total luas perkebunan. Belum optimalnya nilai PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa hal.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Dinas Pertanian Tahun 2018 - 2022 pada bab II bahwa :

- Pertumbuhan produksi beberapa komoditas pertanian menurun antara lain : padi (1,5%), kelapa sawit (5,2%), karet (13,7%), kakao (14,8%), kelapa (11,2%), aren (55,4%), buah-buah-buahan (15,8%), dan bawang merah (5,2%)
- Pertumbuhan produktivitas beberapa komoditas juga mengalami penurunan : kelapa sawit (3,5%), kelapa (-1,9%), jagung (4,8%) kakao (21,9%), kelapa (4,4%)
- Usaha agribisnis & pengolahan pertanian relatif stagnan/tdk berkembang

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja maka pemetaan rumusan permasalahan pembangunan pertanian sebagai berikut :

Gambar 3.1
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah di Dinas Pertanian





Tabel 3.5
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah di Dinas Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya nilai PDRB/Menurunnya kontribusi PDRB sektor pertanian	Belum optimalnya produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Berkurangnya luas panen<ul style="list-style-type: none">• Berkurangnya luas baku lahan sawah akibat alih fungsi lahan• Belum optimalnya luas tanam (serangan hama penyakit dan bencana, pemanfaatan lahan-lahan alternatif/lebak, rawa dll belum maksimal, Upaya peningkatan IP 4 belum berjalan maksimal, Belum berkembangnya pertanian terintegrasi/terpadu• Cetak sawah baru terbatas• Infrastruktur pertanian belum optimal2. Belum meratanya produktivitas antar kecamatan dan antar komoditas<ul style="list-style-type: none">• Teknologi budidaya belum sepenuhnya diterapkan• Sarana produksi pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, benih/bibit) belum terpenuhi sesuai kebutuhan akibat mahalannya harga sarana produksi• Prasarana infrastruktur pertanian belum terpenuhi<ul style="list-style-type: none">▪ Penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat belum optimal▪ Peremajaan sawit rakyat belum berjalan maksimal▪ Masih tingginya serangan hama penyakit tanaman dan bencana alam<ul style="list-style-type: none">- Inovasi teknologi pengendalian OPT belum sepenuhnya diterapkan- Mitigasi dan adaptasi dampak fenomena iklim belum berjalan efektif- Keikutsertaan petani dalam program perlindungan usaha tani masih rendah• Rendahnya kapasitas SDM<ul style="list-style-type: none">- Berkurangnya peran kaum muda tani- Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum diberdayakan



Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi akibat penurunan luas panen dan produktivitas pertanian disebabkan beberapa permasalahan :

A. Lahan

- Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian. Laju alih fungsi lahan di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya $\pm 6,32\%$ /tahun.

Tabel 3.6. Alih fungsi lahan

Luas Baku Lahan Sawah (Ha)					Rata-rata laju alih fungsi (%)
2018	2019	2020	2021	2022	
38.707	36.168	28.173	31.248	28.898	-6,32

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian kian waktu kian meningkat sedangkan peluang perluasan areal pertanian melalui Gerakan Sawah Mandiri (GSM) sudah sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat. Hal ini perlu segera diatasi mengingat belum ada suatu terobosan teknologi dan kelembagaan yang mampu mengkompensasi penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya tanah-tanah pertanian (khususnya sawah beririgasi teknis) yang dirubah kepenggunaan lain. Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan tanah bertujuan agar perubahan penggunaan tanah dapat terkendali khususnya dalam perubahan penggunaan fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sangat mendesak untuk memberlakukan Peraturan Daerah



Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Sempitnya luas lahan yang dimiliki petani

Dari hasil sensus pertanian Tahun 2023 tahap I jumlah petani gurem (luas lahan pertanian < 0.5 ha) sebanyak 70.369 orang (74,12%) dari pengguna lahan pertanian 94.939 orang. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan karena luas lahan yang tidak efisien untuk berusaha tani.

Diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian baik melalui intensifikasi untuk peningkatan IP serta mendorong pemanfaatan lahan-lahan terlantar/kosong.

B. Sarana Infrastruktur Tidak Optimal

Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian. Salah satu prasarana yang utama dalam mendukung produksi pangan (padi) adalah jaringan irigasi. Luas lahan sawah yang berpengairan pada tahun 2022 hanya 83,34% lahan beririgasi setengah teknis, sedangkan pembangunan jaringan irigasi baru serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah rusak masih terkendala akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Salah satu prasarana utama yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan pemasaran hasil sub sektor perkebunan adalah masih rendahnya kondisi jalan produksi di perkebunan rakyat. Upaya yang harus dilakukan adalah pembangunan/penyediaan dan perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, dam parit, long storage, bak buffer dan lain-lain.

C. Ketersediaan Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian belum Optimal

Untuk menerapkan paket teknologi tepat guna dan spesifik lokasi, maka sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan enam tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat penggunaan. Namun hingga saat ini petani belum seluruhnya menggunakan sarana teknologi produksi seperti benih bermutu (rata-rata penggunaan benih unggul bersertifikat saat ini : padi 42%, jagung 100%, kedele



5%, tanaman perkebunan rakyat 40%). Penyediaan benih dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya penangkar benih di dalam kelompok tani sekaligus memperkenalkan sertifikasi benih.

Ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini belum memenuhi kebutuhan teknis budidaya baik jumlah maupun waktu (ketersediaan hanya 60%), pemanfaatan air saat ini belum optimal akibat masih banyaknya jaringan irigasi yang kondisi rusak dan beberapa wilayah pertanian masih sawah tadah hujan.

Selain pupuk, petani juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan pestisida karena harganya tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan pemakaian sarana teknologi seadanya dianggap sudah cukup layak untuk mendukung berlangsungnya usahatani. Petani perlu didorong untuk memenuhi sarana produksi baik pupuk maupun pestisida secara mandiri melalui penerapan pertanian berkelanjutan (pupuk organik dan biopestisida).

Ketersediaan alat mesin pertanian di tingkat petani baik alat olah tanah, alat tanam, panen dan pasca panen masih terbatas akibat harganya yang mahal. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan alat mesin pertanian di tingkat petani perlu penguatan peran kelompok tani maupun P3A dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan peningkatan serta penguatan peran Brigade Alsintan.

D. Kualitas Produk Pertanian Rendah

Sektor pertanian saat ini berada dalam masa peralihan dari pertanian tradisional menjadi pertanian yang berorientasi agribisnis. Peningkatan produksi dan mutu produk merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Permasalahan saat ini menyangkut harga panen produk pertanian yang sangat fluktuatif sehingga menyebabkan pendapatan petani kecil. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha dalam hal penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil, hal tersebut disebabkan oleh karena pembinaan SDM pertanian selama ini lebih difokuskan kepada upaya peningkatan produksi (budidaya) pertanian, sedangkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha yang bersangkutan dalam mengelola produk yang



dihasilkan (pasca panen dan pengolahan hasil) serta pemasarannya, adanya kebutuhan sehari-hari keluarga tani menyebabkan petani langsung menjual hasil panennya tanpa adanya penanganan pasca panen lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk, penyediaan prasarana dan sarana pasca panen belum optimal, penerapan teknologi budidaya dan pasca panen sampai saat ini masih kurang berkembang, akibatnya mutu produk yang diperoleh petani tidak sesuai dengan standar yang diinginkan.

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan keberlangsungan pasokan produk, kuantitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar, keragaman varietas, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pascapanen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri, keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan faktor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

Kendala lain yang dihadapi para petani yang menghasilkan produk-produk unggulan adalah lemahnya akses pemasaran hasil produk unggulan, hal ini menyebabkan turunnya minat petani dalam memproduksi komoditas unggulan.

E. Daya Saing SDM Rendah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing tenaga kerja sektor pertanian adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Dari hasil Survei Hasil Kerja Nasional tahun 2013 memperlihatkan bahwa persentase petani yang berpendidikan SMA ke atas tidak lebih dari 24 % dari total petani di Sumatera Utara. Dari Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sekitar 59 persen petani utama berusia lebih dari 45 tahun yang mengindikasikan kekurangtertarikan kaum muda dan kelemahan regenerasi petani. Salah satu penyebab semakin berkurangnya minat masyarakat menjadi petani adalah dikarenakan rasio antara kerja dan penghasilan yang mereka peroleh tidak seimbang. Petani mendapat laba yang sangat kecil dari usaha menggarap lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh mahalnya sarana produksi yang harus dibeli



petani dan fluktuasi harga saat panen. Biaya tinggi yang harus dikeluarkan petani menjadi persoalan yang menyebabkan masyarakat menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan. Ini membuat tenaga kerja sektor pertanian masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing serta masih lemahnya adopsi teknologi dan pemanfaatan teknologi.

Selain kapasitas SDM petani, petugas khususnya penyuluh pertanian lapangan juga belum sepenuhnya dapat memenuhi tugasnya dalam memberi pengarahan, pembinaan, juga penyuluhan di bidang pertanian secara maksimal akibat masih terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan.

Kelembagaan petani yang saat ini ada juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain : kelembagaan yang dibentuk hanya berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan koordinasi program/kegiatan belum dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi, kurangnya pengetahuan kelompok dalam manajemen kelembagaan, partisipasi anggota kelompok masih rendah dan pembinaan yang dijalankan cenderung hanya kepada pengurus.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan itu Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024”

Untuk mengimplementasikan visi tersebut maka langka-langkah yang akan dilaksanakan dituangkan dalam 5 misi yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- Misi 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.



- Misi 3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
- Misi 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
- Misi 5. Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

Sesuai dengan tupoksinya maka Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2025 terutama misi ke 3 (tiga) yaitu ***Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19*** dengan tujuan ***Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan*** dan Sasaran ***Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah***



Tabel 3.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.</p> <p>Tujuan : Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah</p>			
1	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan memberikan kemudahan akses permodalan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan menurun • Sarana infrastruktur tidak optimal • Ketersediaan saprodi dan alat mesin pertanian belum terpenuhi secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya teknologi • Tersedianya SDM
2	Meningkatkan hasil pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang disesuaikan dengan wilayah dan komoditas unggulan guna menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menanggulangi bencana alam dan non alam.	Wilayah kerja luas dan SDM belum memadai	Rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana yang telah dibangun masih kurang	Adanya dukungan dana dari pusat



No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Melanjutkan pembangunan infrastruktur melalui anggaran daerah dan pemanfaatan dana provinsi dan pusat dengan sasaran jalan, jembatan, drainase, irigasi dan sarana prasarana infrastruktur lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">Wilayah kerja luasJenis OPT dan bencana alam bervariasi dan tidak terprediksi	<ul style="list-style-type: none">SDM pengamat hama dan bencana alam terbatasKetersediaan saprodi untuk penanganan bencana terbatas	<ul style="list-style-type: none">Adanya partisipasi masyarakat sebagai pengamat hama dan bencana alam mandiriAdanya dukungan dari provinsi dan pusat
4	Program Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Jumlah dan kualitas sarana penyuluhKualitas penyuluh harus ditingkatkanKelengkapan berkasSK kelompokRekomendasi permohonan kelompok	<ul style="list-style-type: none">Jumlah dan kualitas saranaprasarana penyuluh masih terbatasKurangnya minat pemuda dalam berusaha di sektor pertanian sehingga adopsi teknologi lambat	<ul style="list-style-type: none">Adanya program pemerintah pusat 1 desa 1 penyuluhTersedianya regulasi sebagai pedoman pembinaan



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L (Kementerian Pertanian)

Tabel 3.8.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan ketahanan pangan2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Kementerian Pertanian merupakan lembaga di tingkat pusat yang membawahi fungsi pembangunan pertanian. Dengan demikian visi, misi dan tujuan kementerian ini juga menjadi acuan bagi penyusunan renstra kabupaten.



Tabel 3.9.
Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pertanaman ≤ 2 • Produksi dan produktivitas jagung dan kedelai masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan • Mutu benih yang digunakan masih rendah • Cuaca ekstrem • Kemampuan SDM masih belum optimal • Infrastruktur terbatas • Sapropdi belum tepat jumlah dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya teknologi • Tersedianya SDM • Dukungan anggaran pusat dan provinsi
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya daya saing produk • Minat petani untuk mengusahakan komoditas potensial baru masih rendah 	Belum tersedia pasar spesifik pertanian Tidak ada jaminan pasar untuk komoditas baru	<ul style="list-style-type: none"> • Beragamnya hasil produk • Besarnya permintaan • Adanya potensi lahan untuk pengembangan komoditas bioindustri dan bioenergi
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Masih rendahnya penerapan manajemen mutu	Belum terlaksananya sistem budidaya dan panen/pascapanen sesuai GAP/SOP	Adanya dukungan dari OPD terkait keamanan pangan (Dinkes)
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	Masih kurangnya inovasi dan teknologi yang spesifik lokasi dari hulu hingga hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan SDM masih belum optimal • Mahalnya harga sarana prasarana mendukung pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan anggaran • Koordinasi lembaga pengkajian yang bersinergi dengan perangkat daerah
5	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Ketersediaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi pupuk bersubsidi tidak mencukupi sesuai kebutuhan • Mahalnya harga sarana pertanian khususnya pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian 	Adanya potensi pengembangan pertanian yang ramah lingkungan
6	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan	Luasnya wilayah pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya petugas pengamat hama penyakit dan bencana alam • Kurangnya ketersediaan sarana produksi untuk penanggulangan OPT dan bencana alam • Infrastruktur khusus untuk penanganan banjir masih belum optimal 	Adanya program perlindungan usaha tani khususnya padi sawah (AUTP)



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Sarana dan prasarana serta SDM belum mendukung kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Petani didominasi dari golongan umur yang sudah tua dan berpendidikan rendah • Kualitas dan jumlah SDM aparatur belum memadai 	Adanya dukungan kebijakan
8	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya	Manajemen pelayanan publik belum optimal <ul style="list-style-type: none"> • 	Adanya dukungan peningkatan tata kelola pemerintahan
9	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Inefisiensi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Program/kegiatan yang tidak spesifik lokasi 	Adanya monitoring dan evaluasi berkala

3.3.2. Telaahan Renstra OPD Provinsi

■ Telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memuat visi dan misi yaitu Visi: *"Pertanian yang maju dan berdaya saing dalam mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan"*, sedangkan Misinya adalah :

1. Mewujudkan Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder
4. Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera

*Tabel 3.10
Permasalahan pelayanan OPD kabupaten berdasarkan Renstra Dinas KPTPH
Provinsi Sumatera Utara*

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Tingkat produktivitas belum merata di seluruh kecamatan	Penggunaan bibit unggul masih rendah Penurunan luas baku Penurunan kesuburan	Adanya teknologi yang sudah teruji
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH	Jumlah sarana dan prasarana belum optimal	Mahalnya harga sarana dan prasarana	Bantuan pemerintah Teknologi
3	Meningkatnya produksi sayuran	Produksi masih rendah	Usaha budidaya berifat sampingan	Kemauan petani cukup tinggi



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya produksi buah-buahan	Produksi masih rendah khusus buah-buahan tahunan	Tingginya alih fungsi tanaman buah tahunan menjadi ubi kayu atau tanaman perkenunan	Permintaan dari konsumen dan pasar yang masih terbuka terhadap buah lokal
5	Meningkatnya produksi tanaman obat	Produksi masih rendah	Usaha budidaya berifat sampingan	Kemauan petani cukup tinggi
6	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing produk pertanian	Nilai tambah dan daya saing produk masih rendah	Adopsi teknologi belum optimal	Masih terbukanya peluang peningkatan nilai tambah dan daya saing
7	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Nilai tambah dan daya saing produk masih rendah	Belum tersedia pasar spesifik	Masih terbukanya pasar dan permintaan produk pertanian

Secara umum masalah, potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara relatif sama dengan yang dihadapi Kabupaten Serdang Bedagai.

Permasalahan di bidang pembangunan sub sektor pertanian yaitu :

- a) Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian
- b) Masih rendahnya daya saing sektor primer (pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan) dilihat dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri
- c) Tingkat kesejahteraan petani umumnya belum memenuhi standard hidup layak (NTP masih rendah);
- d) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, jalan usaha tani, pusat pemasaran produk pertanian) ;
- e) Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
- f) Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan pertanian
- g) Belum optimalnya penggunaan teknologi, sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian;



- h) Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat
- i) Terbatasnya kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk

■ Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 adalah : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Perkebunan melalui Penerapan Agribisnis yang Berdaya Saing, Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka yang menjadi misi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah memfasilitasi peningkatan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan pertanian oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah “Mewujudkan Perkebunan Yang Berkelanjutan Dan Bermartabat” dan sasaran “Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan”.

Tabel 3.11
Permasalahan pelayanan OPD kabupaten berdasarkan Renstra OPD Provinsi (Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara)

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanaman didominasi tanaman yang sudah tua • Masih rendahnya penggunaan bibit bermutu • Sistem budidaya yang tidak memadai sesuai ketentuan teknis 	Adanya teknologi yang sudah teruji

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka pengembangan/ pembangunan Serdang Bedagai, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan/pembangunan wilayah Serdang Bedagai. Konsep skenario pengembangan/pembangunan Serdang Bedagai diatur pada suatu Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021



tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033.

Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap :

a. Kawasan Tanaman Pangan sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan lain (peraturan bupati, surat keputusan kepala dinas, dll) untuk mendukung implementasi Perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Inventarisasi dan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
3. Penyusunan kebijakan insentif bagi pemilik yang lahannya merupakan bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan
4. Inventarisasi lahan-lahan sawah yang masuk dalam kawasan lindung agar dapat dilepaskan menjadi lahan pangan
5. Pemantapan infrastruktur pertanian pada kawasan tanaman pangan
6. Pembangunan sentra budidaya pertanian tanaman pangan
7. Penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian organisme pengganggu tanaman

b. Kawasan Hortikultura

1. Perlunya pengembangan/pembangunan sentra-sentra budidaya hortikultura
2. Pembangunan prasarana pendukung pengembangan sentra hortikultura
3. Penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura

c. Kawasan Perkebunan

1. Identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial
2. Identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang ijinnya
3. Pelepasan HGU untuk pemanfaatan kawasan pemerintahan
4. Peningkata produktivitas perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan
5. Pengembangan tanaman kayu tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan > 25%



Salah satu visi pembangunan pertanian adalah *berkelanjutan* yaitu pertanian yang pada waktu mendatang dapat bersaing, produktif, menguntungkan, mengkonservasi sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesehatan, kualitas pangan, dan keselamatan. Isu-isu terkait dengan ketahanan pangan adalah :

- (1) Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya
- (2) Belum optimalnya fungsi infrastruktur irigasi
- (3) Belum optimalnya akses pendukung infrastruktur (jalan produksi, jalan usaha tani)
- (4) Pemenuhan swasembada pangan
- (5) Masih rendahnya penguasaan teknologi di tingkat petani
- (6) Terbatasnya kepemilikan lahan petani

Permasalahan lingkungan dan tata ruang yang menjadi penghambat pelayanan sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai yang terinventarisir adalah : 1) alih fungsi lahan; 2) rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 3) penurunan kualitas lingkungan; dan 4) lemahnya penegakkan hukum lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memahami permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian dihadapkan dalam isu strategis lima tahun ke depan adalah :

1. *Peningkatan produksi*
2. *Peningkatan produktivitas*
3. *Peningkatan luas pertanaman*
4. *Alih fungsi lahan*
5. *Pembangunan infrastuktur pertanian*
6. *Serangan hama penyakit*
7. *Penerapan teknologi pertanian*
8. *Peningkatan kapasitas SDM*
9. *Meningkatkan peran kaum muda tani/petani milenial*

Dengan berbagai kendala dan tantangan, peningkatan produksi dan produktivitas menjadi isu utama di bidang pertanian. Kecukupan pangan menjadi syarat pertama



dalam upaya pencapaian swasembada pangan menuju kedaulatan pangan. Di sub sektor perkebunan peningkatan produksi terkendala karena produktivitas tanaman perkebunan rakyat belum optimal (masih rendah), banyaknya tanaman tua yang kurang produktif, harga produksi tanaman perkebunan yang fluktuatif yang mempengaruhi minat petani untuk membudidayakan tanaman perkebunan dan serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mempedomani pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026 tidak menetapkan visi dan misi tetapi tujuan, sasaran yang ditetapkan diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi kabupaten. Sesuai tupoksinya untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Serdang Bedagai peran Dinas Pertanian terutama di misi ke – 3 (tiga) yakni ***“Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.***

Melalui misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 pada Perubahan RPJMD yaitu :” ***Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan*** dan sasaran : ***” Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah”***. Untuk menjabarkan tujuan dan dan sasaran pada RPJMD Perubahan maka dirumuskan revisi tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 serta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten dengan Dinas Pertanian sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
dengan Renstra Dinas Pertanian

Visi	:	MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024	
Misi 3	:	Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19	
		RPJMD	RPJMD PERUBAHAN
Tujuan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD)	:	Memulihkan Perekonomian Daerah	Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan
Sasaran Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD)	:	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah
		RENSTRA	RENSTRA PERUBAHAN
Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra)	:	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah 3. Luas tanam dan luas panen tan. pangan dan hortikultura 4. Produktivitas tanaman pangan dan perkebunan 5. Luas pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Pertanian 2. Meningkatnya luas panen 3. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian

Perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini : :

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sebelum Perubahan											
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan		Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan	%	68,96	69,01	69,14	-	-	-	-	-
	Produksi tan.pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi tan.pangan, hortikultura dan perkebunan :									
		Padi	ton	386.749	386.749	406.086	-	-	-	-	-
		Ubi Kayu	ton	638.004	638.004	669.904	-	-	-	-	-
		Jagung	ton	31.543	31.543	33.120	-	-	-	-	-
		Kelapa Sawit	ton	1.172.770,26	142.377,10	142.802,23	-	-	-	-	-
		Kelapa	ton	2.241,83	2.223,72	2.230,39	-	-	-	-	-
		Karet	ton	42.077,53	8.658,74	8.684,71	-	-	-	-	-
		Kakao	ton	800,02	645,63	647,57	-	-	-	-	-
		Aren	ton	-	17,40	17,45	-	-	-	-	-
		Sayur-Sayuran	ton	3.752	6.756	9.223	-	-	-	-	-
Buah-Buahan	ton	73.466	62.001	44.784	-	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Luas tanam dan luas panen tan. pangan dan hortikultura	Peningkatan luas tanam dan luas panen tanaman pangan dan hortikultura									
		Luas Tanam :									
		Padi	ha	56.739	56.889	60.889	-	-	-	-	-
		Jagung	ha	4.639	4.689	4.739	-	-	-	-	-
		Ubi Kayu	ha	10.722	10.772	10.822	-	-	-	-	-
		Sayur-Sayuran	ha	785	866	946	-	-	-	-	-
		Buah-Buahan	ha	3.145,51	3.460,05	3.806,05	-	-	-	-	-
		Luas panen :									
		Padi	ha	63.725	62.054	66.054	-	-	-	-	-
		Jagung	ha	8.367	8.748	8.798	-	-	-	-	-
		Ubi Kayu	ha	13.443	13.491	13.541	-	-	-	-	-
		Sayur-Sayuran	ha	781	861	941	-	-	-	-	-
		Buah-Buahan	ha	2.516,40	2.768,04	3.044,84	-	-	-	-	-
	Produktivitas tanaman pangan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan									
		Padi	ton/ha	6,22	6,22	6,53	-	-	-	-	-
		Ubi kayu	ton/ha	47,46	47,46	49,83	-	-	-	-	-
		Jagung	ton/ha	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	-
		Kelapa sawit	Kg/ha	13.014,99	13.694,62	13.735,71	-	-	-	-	-
		Kelapa	kg/ha	1.129,47	1.160,18	1.163,66	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah	Peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :									
		Padi Organik	ton	104,77	137	169	-	-	-	-	-
		Buah Organik	ton	180	230	280	-	-	-	-	-
		Penangkar Padi	ton	1.451	1.551	1.651	-	-	-	-	-
		Bawang Merah	ton	249	300	400	-	-	-	-	-
		Cabe Merah	ton	335	600	800	-	-	-	-	-
	Pengembangan komoditas unggulan	Peningkatan luas pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :									
		Padi Organik	ha	42	47	52	-	-	-	-	-
		Buah Organik	ha	4	5	6	-	-	-	-	-
		Penangkar Padi	ha	494	514	534	-	-	-	-	-
		Bawang Merah	ha	41	40	80	-	-	-	-	-
		Cabe Merah	ha	110	120	160	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setelah Perubahan											
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian		Nilai PDRB sektor pertanian	Milyar Rp	11.134,01	-	-	11.032,38	12.135,62	13.349,18	14.684,10	14.684,10
	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi padi (ton/tahun)	ton		-	-	336.600	343.332	350.199	357.203	357.203
		Jumlah produksi ubi kayu (ton/tahun)	ton		-	-	671.339	673.318	674.901	676.533	676.533
		Jumlah produksi kelapa sawit (ton/tahun)	ton		-	-	143.232,64	143.662,34	143.833,87	145.305,55	145.305,55
		Jumlah produksi cabe merah (ton/tahun)	ton		-	-	1.278	1.406	1.546	1.701	1.701
		Jumlah produksi bawang merah (ton/tahun)	ton		-	-	466	490	514	540	540
		Jumlah produksi padi organik (ton/tahun)	ton		-	-	194	213	234	258	258

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya luas panen	Luas panen padi (ha/tahun)	ha		-	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		Luas panen ubi kayu(ha/tahun)	ha		-	-	18.150	19.965	21.962	24.158	24.158	
		Luas panen kelapa sawit (ha/tahun)	ha			-	-	11.124,90	11.436,79	11.608,34	11.782,46	11.782,46
		Luas panen cabe merah (ha/tahun)	ha			-	-	160	176	193	213	213
		Luas panen bawang merah (ha/tahun)	ha			-	-	78	82	86	90	90
		Luas panen padi organik (ha/tahun)	ha			-	-	16	18	20	21	21

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian	Jumlah produktivitas padi (ton/ha)	ton/ha		-	-	6,02	6,08	6,09	6,10	6,10
		Jumlah produktivitas ubi kayu (ton/ha)	ton/ha		-	-	36	37	38	39	39
		Jumlah produktivitas kelapa sawit (kg/ha)	ton/ha		-	-	12.377	12.561	12.745	12.940	12.940
		Jumlah produktivitas cabe merah (ton/ha)	ton/ha		-	-	8	8	8	8	8
		Jumlah produktivitas bawang merah (ton/ha)	ton/ha		-	-	6	6	6	6	6
		Jumlah produktivitas padi organik (ton/ha)	ton/ha		-	-	6	6	6	6	6
Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	peringkat		-	-	A	A	A	A	A



Dari 6 (enam) produksi pertanian yang digunakan sebagai indikasi keberhasilan kinerja Dinas Pertanian, peningkatan produksi difokuskan terhadap 4 (empat) komoditas karena merupakan indikator dari salah satu program prioritas pembangunan daerah ke 3 yaitu “Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan” dari 7 (tujuh) program prioritas daerah (SAPTA DAMBAAN). Keempat indikator tersebut adalah :

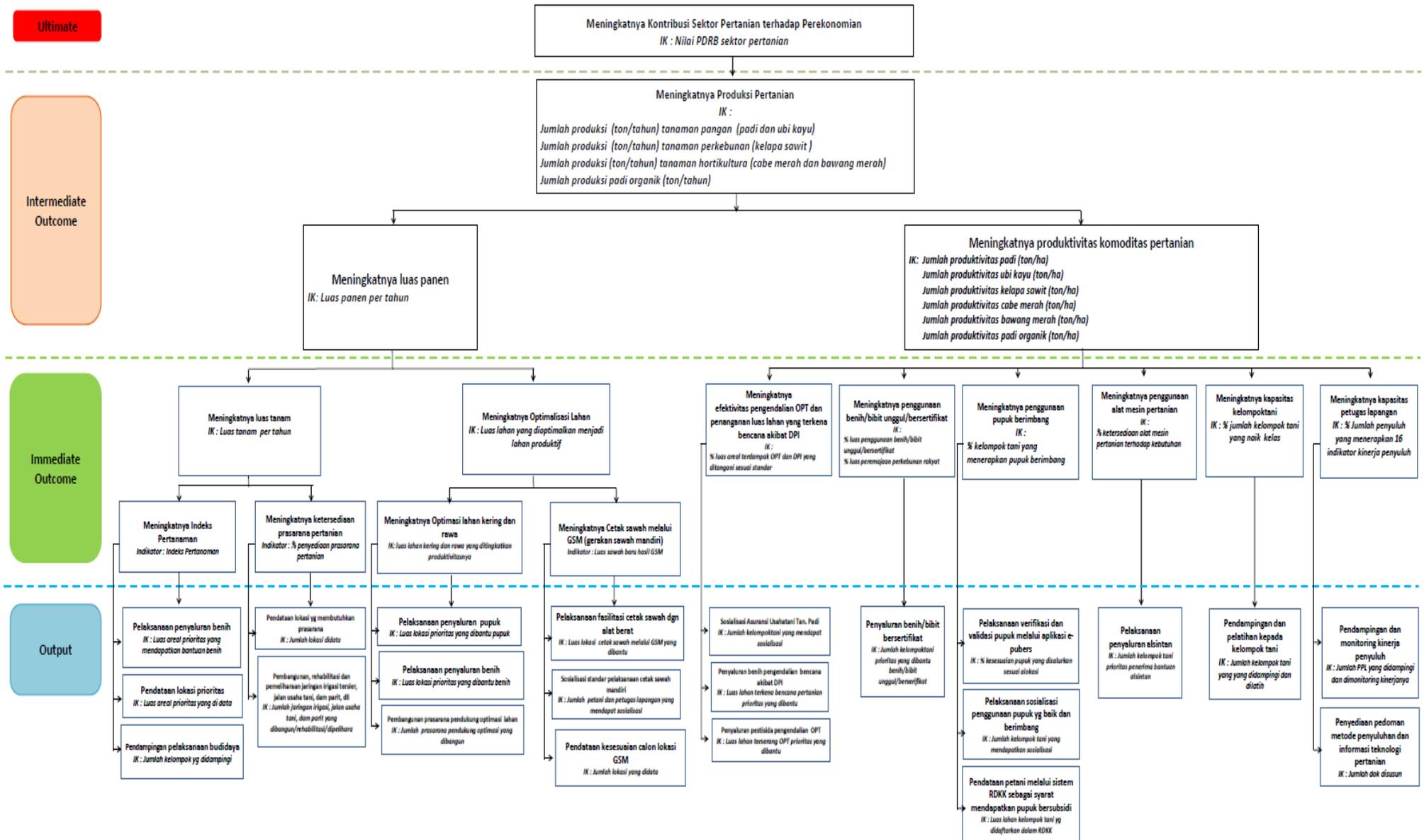
1. Produksi padi
2. Produksi cabe merah
3. Produksi bawang merah
4. Produksi padi organik

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas pertanian disusun pohon kinerja sebagai alat bantu untuk menjabarkan kinerja dan indikator untuk menghasilkan outcome yang diinginkan dan memandu menemukan strategi serta solusi dalam mencapai kinerja.

Prioritas kinerja Dinas Pertanian adalah meningkatnya produksi pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian maka luas panen dan produktivitas juga harus meningkat. Peningkatan luas panen akan tercapai jika alih fungsi lahan terkendali, indeks pertanaman meningkat, optimalisasi gerakan sawah mandiri untuk cetak sawah baru dan peningkatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian

Peningkatan produktivitas akan tercapai melalui penerapan teknologi pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik petugas maupun petani dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan bencana alam pada pertanaman.

Gambar 4.1
Pohon Kinerja Dinas Pertanian



DISTRIBUSI KINERJA

LEVEL KINERJA						KINERJA JABATAN		
Kinerja Strategis Daerah	Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan					Tujuan RPJMD	PK KEPALA DAERAH	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi					Indikator Tujuan RPJMD		
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah					Sasaran RPJMD		
	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan					Indikator Sasaran RPJMD		
Kinerja Strategis Bidang Urusan	Meningkatkan Nilai PDRB Sektor Pertanian					Tujuan Renstra	PK KEPALA DINAS	
	Nilai PDRB sektor pertanian					Indikator Tujuan Renstra		
	Meningkatnya Produksi Pertanian, Meningkatnya Luas Panen, Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian					Sasaran Renstra		
	Jumlah Produksi Padi, Ubi Kayu, Klp Sawit, Padi Organik, Cabe Merah, Bawang Merah Jumlah Luas PanenPadi, Ubi Kayu, Klp Sawit, Padi Organik, Cabe Merah, Bawang Merah , Jumlah Produktivitas Padi, Ubi Kayu, Klp Sawit, Padi Organik, Cabe Merah, Bawang Merah					Indikator Sasaran Renstra		
Kinerja Manajerial	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program	PK Eselon 3
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian ➢ Persentase lahan pertanian yang terlindungi ➢ Luas GSM 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rasio ketersediaan pupuk thd kebutuhan ➢ Rasio ketersediaan alat-alat thd kebutuhan ➢ Rasio ketersediaan benih/bibit thd kebutuhan ➢ Rasio ketersediaan pestisida thd kebutuhan 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase bencana pertanian yg ditangani 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kelompok tani yg naik kelas ➢ Persentase 16 indikator kinerja penyuluh pertanian yang tercapai 	Indikator Program	
Kinerja Manajerial	Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Kegiatan	SKP JF
	LP2B, KP2B dan LCP2B yg dikelola	➢ Jumlah prasarana pertanian yg dibangun	➢ Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	➢ Persentase bencana pertanian yang ditangani	➢ Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian		Indikator Kegiatan	
Kinerja Operasional	Sub Keg. Pengelolaan LP2B/KP2B/LCP2B	Sub Keg. Pembangunan/Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Sub Keg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Keg. Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sub Keg. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan/Desa		Sub Kegiatan	SKP JF
	LP2B, KP2B dan LCP2B yg dikelola	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Indikator Sub Kegiatan	



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kabupaten Serdang Bedagai “**MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024**” telah dijabarkan dalam 5 misi dan 7 (tujuh) prioritas capaian (**SAPTA DAMBAAN**).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian maka untuk mendukung pencapaian misi 3 yaitu “**Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19** dan salah satu dari 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah (**SAPTA DAMBAAN**) yaitu “**Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan**” yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mandiri dan berkelanjutan pangan yang ditafsirkan sebagai kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat untuk saat ini dan yang akan datang.
2. Mandiri dan berkelanjutan usahatani yang ditafsirkan bahwa petani dalam berusaha tani dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (benih, pupuk, pestisida), mengusahakan/mengolah hasil pertanian yang bernilai jual tinggi sehingga menguntungkan dari segi ekonomi dan tidak merusak lingkungan.

5.2. Strategi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi pertanian maka dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu dengan :

- Meningkatkan luas panen
- Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian



5.3. Arah Kebijakan

Alur strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati sebagai berikut :

*Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

VISI	:	MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024		
MISI III	:	Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemik wabah Covid-19		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Nilai PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	Meningkatkan luas panen (luas tanaman yang dapat dipanen)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian melalui implementasi regulasi lahan (Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda tentang Lahan Kosong) • Peningkatan luas tanam (peningkatan indeks pertanaman untuk lahan-lahan produktif, optimalisasi lahan-lahan yang kurang/tidak produktif khususnya lahan rawa dan tadah hujan menjadi lebih produktif • Peningkatan cetak sawah mandiri melalui optimalisasi Gerakan Sawah Mandiri • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pertanian 	
		Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penerapan teknologi pertanian • Meningkatkan luas pengendalian OPT dan penanganan luas lahan yang terkena bencana • Meningkatkan kapasitas SDM 	

5.4. Dukungan OPD Terkait dalam Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor pertanian tidak dapat berdiri sendiri tetapi terkait dengan sektor-sektor lain yang mendukung. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari perangkat daerah atau instansi lain sebagai berikut :



Tabel. 5.2.
Dukungan Program Perangkat Daerah Terkait dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai

No.	Instansi	Dukungan	Program
1	PMD	Kebijakan yang mendorong pemanfaatan lebih besar dana desa untuk pengembangan sektor pertanian	Administrasi Pemerintahan Desa
2	Dinas PU	Dalam rangka peningkatan produksi maka pembangunan infrastruktur terintegrasi perlu dilakukan khususnya jaringan irigasi. Diharapkan Dinas PU membangun jaringan sekunder pada daerah sentra-sentra pertanian di Kecamatan Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Baman dan Bandar Khalipah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Air • Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Koordinasi dalam pembinaan kelompok-kelompok pengelola air (IP3A, GP3A, P3A) dalam menentukan musim tanam	
		Kebijakan penyelenggaraan ruang sesuai dengan peruntukan berdasarkan RTRW kabupaten	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis bahan baku pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pengembangan UMKM
		Fasilitasi sarana pengolahan bahan baku pertanian	
		Peningkatan promosi dan kerjasama dalam pemasaran produk-produk pertanian	
		Peningkatan operasional resi gudang sebagai salah satu perlindungan terhadap petani	
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelepasan kawasan untuk perluasan budidaya pertanian di Kecamatan Bandar Khalipah	Perencanaan Lingkungan Hidup
5	Dinas Pendidikan	Kebijakan untuk menampung muatan lokal pertanian dalam sistem pembelajaran di tingkat dasar maupun menengah untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bidang pertanian serta menumbuhkan penghargaan terhadap profesi petani dan produk pertanian	Pengelolaan Pendidikan



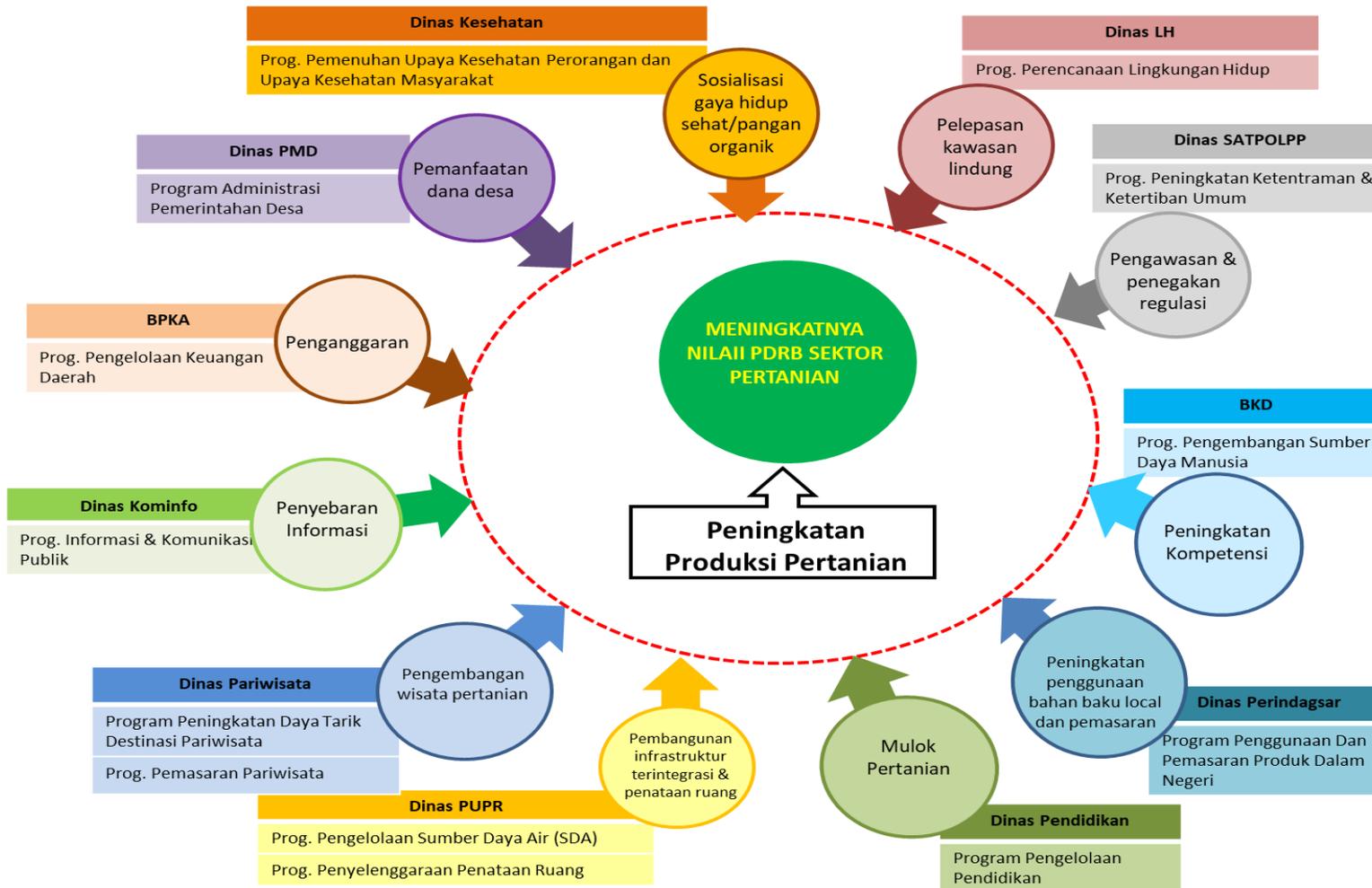
6	Dinas Kesehatan	Peningkatan sosialisasi pangan sehat/organik sehingga terbuka pasar bagi produk-produk organik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Dinas Parbudpora	Mendorong dan membina kawasan wisata pada sentra-sentra pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata• Pemasaran Pariwisata
8	Dinas Infokom	Menginformasikan produk-produk dan pembangunan sektor pertanian dalam kanal kabupaten	Informasi dan Komunikasi Publik
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset	Mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Pengelolaan Keuangan Daerah
10	Badan Kepegawaian Daerah	Menyelenggarakan dan memfasilitasi uji kompetensi petugas di sektor pertanian	Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	SATPOLPP	Meningkatkan peran pengawasan dan penegakan regulasi terkait sektor pertanian	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12	Kecamatan/Desa	Peran aktif dalam pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program pertanian di wilayahnya serta memberikan masukan/informasi terkait	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Dinas Pertanian juga ikut berperan dalam mendukung keberhasilan program-program kabupaten antara lain penanganan stunting yang difokuskan pada basic causes (kondisi sosial, ekonomi, akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial) melalui kebijakan mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani. Dinas Pertanian telah mewujudkan swasembada beras serta terus meningkatkan produksi untuk komoditas pertanian lainnya. Selain itu salah satu upaya untuk penanganan stunting, Dinas Pertanian saat ini juga mengembangkan penangkaran benih padi unggul biofortifikasi NUTRIZINC dan selanjutnya mendistribusikan benih padi tersebut agar dapat dibudidayakan secara luas di tingkat petani. Untuk selanjutnya diharapkan sinergitas dan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penyediaan beras untuk bantuan kepada masyarakat dapat menggunakan beras nutrizinc yang dihasilkan oleh petani.

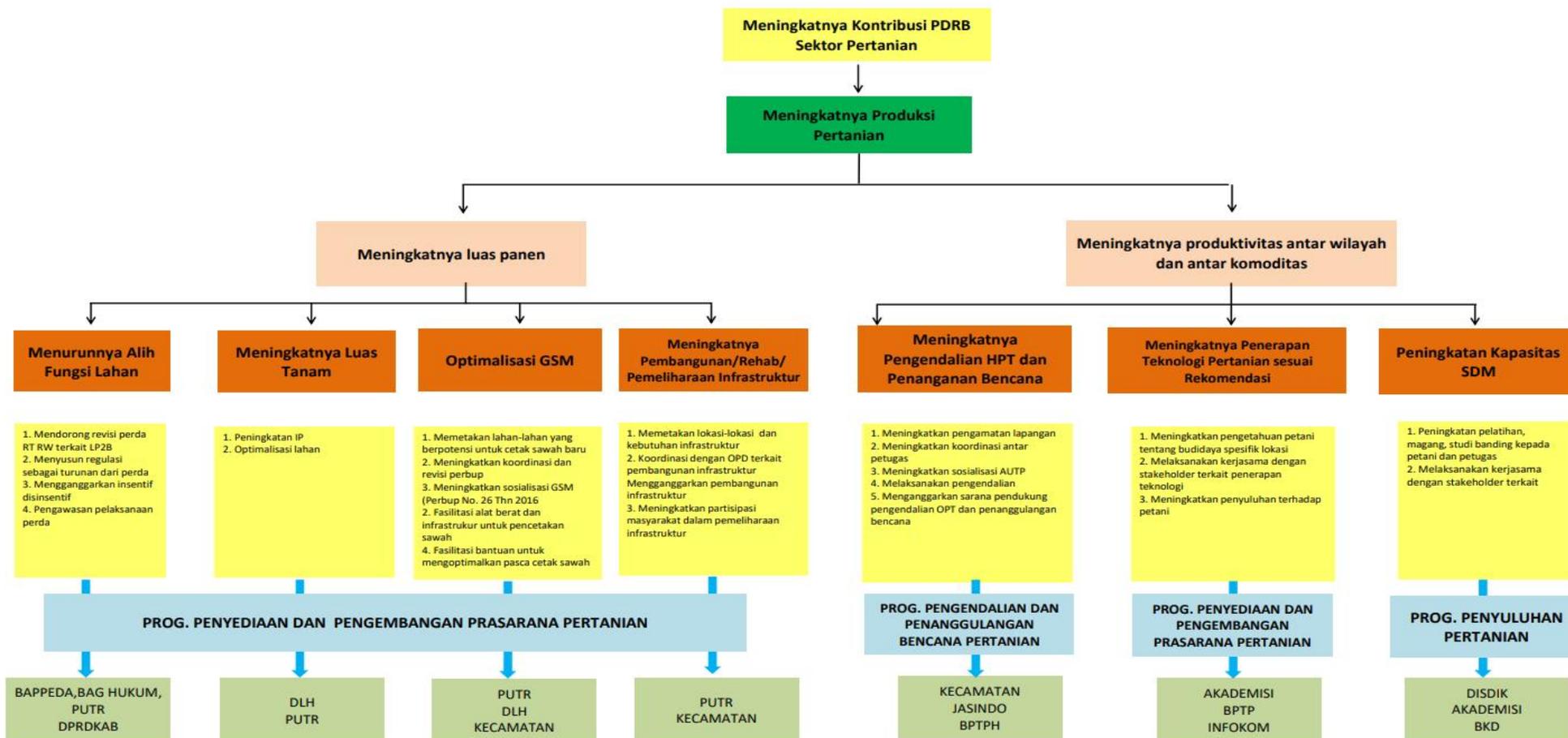


Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai serta empat kluster penanggulangan kemiskinan, Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam kluster 2 (dua) yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelembagaan petani. Salah satu program yang mendukung penanganan kemiskinan adalah dengan melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan luas pertanaman melalui ketersediaan irigasi dan ketersediaan infrastruktur/prasarana yang menggerakkan proses produksi dan pemasaran produk komoditas pertanian yang memadai sehingga dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, dll. Selain itu Dinas Pertanian juga melaksanakan kegiatan penyediaan sarana produksi pengembangan budidaya melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Gambar 5.1. Cross cutting dukungan Program OPD terkait terhadap tujuan dan sasaran Dinas Pertanian



Gambar 5.2. Cross cutting dukungan OPD terkait terhadap Program untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian



Gambar 5.3. Crosscutting bidang terhadap program untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian



BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unsur di Dinas Pertanian selama 6 (enam) tahun. Berdasarkan arah pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai melalui program prioritas dalam Program Pembangunan Daerah Kabupten Serdang Bedagai yang disebut SAPTA DAMBAAN (SABDA), maka Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya melaksanakan program-program sebagai berikut :

Misi 3	: Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19
Tujuan RPJMD	: Memulihkan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah
Tujuan RENSTRA	: Meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian
Sasaran RENSTRA	: Meningkatnya produksi pertanian

Sapta Dambaan 3 (tiga)	: Pertanian Mandiri Berkelanjutan
Program Prioritas Mendukung SABDA 3	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian
Sapta Dambaan 7 (Tujuh)	: Birokrasi Dambaan
Program Pendukung SABDA 7	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai secara terinci sebagai berikut :

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim.ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN																				
Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	point	54,44	60		65		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Nilai SAKIP	predikat	B	B		BB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.27.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	predikat	B	B	14,454,125,975	BB	14,830,054,965		-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	1	13,132,330,975	1	13,286,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB		2,100		2,310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok		12		12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					111,482,300		114,054,965		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	pkt		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	pkt		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	pkt		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	pkt		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	pkt		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	pkt		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				70,248,700		150,000,000		-		-		-		-		-	
			Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		1		1		-		-		-		-		-		-
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1,081,600,000		1,100,000,000		-		-		-		-		-		-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	thn		1		1		-		-		-		-		-		-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	thn		1		1		-		-		-		-		-		-
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			58,464,000		180,000,000		-		-		-		-		-		-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	thn		1		1		-		-		-		-		-		-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	thn		1		1		-		-		-		-		-		-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	thn		1		1		-		-		-		-		-		-

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim. ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan				Persentase peningkatan kontribusi PDRB sektor unggulan	%	68.96	69.01		69.14		-		-		-		-		-		-		
Produksi tan. Pangan, hortikultura dan perkebunan				Peningkatan produksi tan.pangan, hortikultura dan perkebunan :																			
				Padi	ton	386,749	386,749		406,086		-		-		-		-		-		-		-
				Ubi Kayu	ton	638,004	638,004		669,904		-		-		-		-		-		-		-
				Jagung	ton	31,543	31,543		33,120		-		-		-		-		-		-		-
				Kelapa Sawit	ton	1,172,770.26	142,377.10		142,802.23		-		-		-		-		-		-		-
				Kelapa	ton	2,241.83	2,223.72		2,230.39		-		-		-		-		-		-		-
				Karet	ton	42,077.53	8,658.74		8,684.71		-		-		-		-		-		-		-
				Kakao	ton	800.02	645.63		647.57		-		-		-		-		-		-		-
				Aren	ton	-	17.40		17.45		-		-		-		-		-		-		-
				Sayur-Sayuran	ton	3,752	6,756		9,223		-		-		-		-		-		-		-
Buah-Buahan	ton	73,466	62,001		44,784		-		-		-		-		-		-		-				
Luas tanam dan luas panen tan. pangan dan hortikultura				Peningkatan luas tanam dan luas panen tanaman pangan dan hortikultura :																			
				Luas Tanam :																			
				Padi	ha	56,739	56,889		60,889		-		-		-		-		-		-		-
				Jagung	ha	4,639	4,689		4,739		-		-		-		-		-		-		-
				Ubi Kayu	ha	10,722	10,772		10,822		-		-		-		-		-		-		-
				Sayur-Sayuran	ha	785	866		946		-		-		-		-		-		-		-
				Buah-Buahan	ha	3,145.51	3,460.05		3,806.05		-		-		-		-		-		-		-
				Luas panen :																			
				Padi	ha	63,725	62,054		66,054		-		-		-		-		-		-		-
				Jagung	ha	8,367	8,748		8,798		-		-		-		-		-		-		-
Ubi Kayu	ha	13,443	13,491		13,541		-		-		-		-		-		-		-				
Sayur-Sayuran	ha	781	861		941		-		-		-		-		-		-		-				
Buah-Buahan	ha	2,516.40	2,768.04		3,044.04		-		-		-		-		-		-		-				

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keeg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim.ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	70%	75%	883,990,750	80%	2,158,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Luas sawah baru	ha	368	150		150											
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					294,663,583		200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Cetak Sawah Mandiri	ha		150		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Optimasi Lahan	ha		500		500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyusunan Database JIT	dok		0		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Operasional Brigade Alsintan	thn		0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyusunan Rencana Tanam Tahunan	dok		0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Revitalisasi Regulasi	dok															
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					589,327,167		1,958,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier	m		0		2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan Jalan Usaha Tani	m		500		1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan Pintu Air	unit		2		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan Dam Parit	unit		4		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan Rumah Pompa	unit		0		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.02	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan				251,069,450		250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Alat mesin pertanian			0.26		0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pupuk			0.32		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pestisida			0.15		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Benih/bibit		1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					251,069,450		250,000,000			-		-			-		-
			PAT	ha			0		400			-		-			-		-	
			Diversifikasi pola tanam	ha			0		400			-		-			-		-	
			Luas peningkatan IP	ha			0		4000			-		-			-		-	
			Jumlah pengadaan alsintan :									-		-			-		-	
			Transplanter	unit			0		2			-		-			-		-	
			Handtraktor	unit			0		5			-		-			-		-	
			Cultivator	unit			0		4			-		-			-		-	
			Luas pengembangan budidaya cabe	ha			0		40			-		-			-		-	
			Luas pengembangan budidaya b. merah	ha			0		40			-		-			-		-	
			Jumlah pengadaan bibit buah-buahan unggul	btg			0		20,000			-		-			-		-	
			Luas pengembangan budidaya komoditi baru potensial	ha			0		1			-		-			-		-	
		3.27.05	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani		NA	15%	102,106,275	20%	225,000,000			-		-			-		-
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota					102,106,275		225,000,000			-		-			-		-
			Gerakan pengendalian OPT	kali			1		1			-		-			-		-	
			SL iklim	unit			0		2			-		-			-		-	
			Penyediaan ASW	unit			0		0			-		-			-		-	
			SLPHT	unit			0		2			-		-			-		-	
			AUTP	ha			1000		1000			-		-			-		-	
			Pengadaan benih CBD	ha			0		1000			-		-			-		-	
			Luas penggunaan benih adaptif iklim	ha			0		1000			-		-			-		-	
	Produktivitas tanaman pangan dan perkebunan			Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan :																
				Padi	ton/ha		6.22	6.22	6.53			-		-			-		-	
				Ubi kayu	ton/ha		47.46	47.46	49.83			-		-			-		-	
				Jagung	ton/ha		3.77	3.77	3.77			-		-			-		-	
				Kelapa sawit	kg/ha		13,014.99	13,694.62	13,735.71			-		-			-		-	
				Kelapa	kg/ha		1,129.47	1,160.18	1,163.66			-		-			-		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Dalam Kondisi Baik		70%	75%	200,000,000	80%	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					200,000,000		200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan UPPO	unit		0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan jalan produksi	km		2		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.02	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan				502,138,900		500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Alat mesin pertanian			0.26		0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pupuk			0.32		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pestisida			0.15		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Benih/bibit			1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					376,604,175		375,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penggunaan benih unggul baru	ha		0		4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penggunaan benih unggul baru dan genjah	ha		0		4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan benih unggul oleh penangkar	ton		1,500		2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penerapan budidaya jajar legowo	ha		20,000		20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penerapan budidaya jajar legowo super	ha		-		1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penggunaan varietas unggul bersertifikat	ha		10,000		15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan bibit kelapa sawit	btg		5,000		5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan bibit kelapa	btg		1,500		1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Bantuan alat pasca panen perkebunan	kel		4		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Peremajaan sawit rakyat	ha		-		800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penerapan smart farming dan Pertanian presisi	ha		1		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyediaan combine harvester	unit				3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyediaan power thresher	unit				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					125,534,725		125,000,000										
				Fasilitas KP3	thn		1		1											
				Survey ubinan	sampel		300		300											
				Operasional kebun bibit	thn		1		1											
				Rapat Posko	kali		384		384											
		3.27.05	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani			15%	34,035,425	20%	75,000,000										
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota					34,035,425		75,000,000										
				Intensifikasi pengamatan dan pengendalian OPT	bln		12		12											
				Pengadaan pestisida tan. Pangan	Ha		750		750											
				Pengadaan pestisida tanaman perkebunan	kel		1		1											
				Penggunaan benih adaptif iklim	ha		100		150											
	Produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah			Peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :																
				Padi Organik	ton	104.77	137		169											
				Buah Organik	ton	180	230		280											
				Penangkar Padi	ton	1,451	1,551		1,651											
				Bawang Merah	ton	249	300		400											
				Cabe Merah	ton	335	600		800											
	Pengembangan komoditas unggulan			Peningkatan luas pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :																
				Padi Organik	ha	42	47		52											
				Buah Organik	ha	4	5		6											
				Penangkar Padi	ha	494	514		534											
				Bawang Merah	ha	41	40		80											
				Cabe Merah	ha	110	120		160											

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.02	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan			251,069,450	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Alat mesin pertanian			0.26	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pupuk			0.32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pestisida			0.15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Benih/bibit			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				251,069,450	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi sertifikasi produk organik	unit		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan	pkt		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan alat pasca panen organik	unit		0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi sertifikasi penangkar	kel		0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan kemitraan pemasaran produk organik	Mou		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangn korporasi tani	unit		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan vacuum frying	unit		0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan budidaya padi khusus lainnya	ha		0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan kampung hortikultura	unit		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan cold storage	unit		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan alat pengolahan industri kecil berbasis bahan baku pertanian lokal	unit		0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan sarana budidaya jamur	unit		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi sarana produksi	kel		0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi sarana produksi organik	kel		0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Desa mandiri benih	unit		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim.ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Dalam Kondisi Baik		70%	75%	683,990,750	80%	958,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					683,990,750		958,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan bangsal hortikultura	unit		0		2		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan penggilingan dan RMU organik	pkt		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan penggilingan dan RMU beras premium	unit		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan lantai jemur	unit		0		4		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembangunan UV Dryer	unit		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sub Terminal Agribisnis	unit		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pasar Tani	unit		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Food Estate	unit		0				-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengembangan sawah wisata/Agrowisata	unit		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyediaan ekatalog perbenihan	pkt		0		1		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penyediaan aplikasi elektronik informasi tanam, pane, pemasaran dan klinik tanaman	apl		0		0		-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	%		1	13,884,800	0		-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.27.06.2.01	Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Ka/Kota					13,884,800			-	-	-	-	-	-	-	-		
				Sosialisasi kemitraan usaha	kali		1		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					627,288,300		539,152,001	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah promosi produk pertanian yang diikuti	kali	5	0		2		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah produk lokal yang diekspor	Produk		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlnm ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN																				
Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian	Meningkatnya produksi pertanian			Nilai PDRB sektor pertanian	milyar Rp	-	-	11,032.38	12,135.62	13,349.18	14,604.10	14,604.10	14,604.10							
				Produksi padi	ton	-	-	336,600	343,332	390,199	357,203	357,203	357,203							
				Produksi ubi kayu	ton	-	-	671,339	673,318	674,901	676,533	676,533	676,533							
				Produksi kelapa sawit	ton	-	-	143,233	143,662	143,834	145,306	145,306	145,305.55							
				Produksi cabe merah	ton	-	-	1,278	1,406	1,546	1,701	1,701	1,701							
				Produksi bawang merah	ton	-	-	466	490	514	540	540	540							
				Produksi padi organik	ton	-	-	194	213	234	258	258	258							
		3,27,02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2,000,000,000	1,500,000,000	2,256,486,000	2,900,000,000	8,656,486,000								
			Rasio ketersediaan alat mesin pertanian terhadap kebutuhan				-	0.45	0.5	0.55	0.6	0.6								
			Rasio ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan				-	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9								
			Rasio ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan				-	0.4	0.45	0.5	0.55	0.55								
			Rasio ketersediaan benih/pupuk terhadap kebutuhan				-	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15								
		3,27,02,2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	lap		-	1	2,000,000,000	1	1,500,000,000	1	2,256,486,000	1	2,900,000,000	4	8,656,486,000			
	3,27,02,2,01,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	lap		-	4	500,000,000	4	750,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	16	2,250,000,000				
	3,27,02,2,01,02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	lap		-	4	1,500,000,000	4	750,000,000	4	1,756,486,000	4	2,400,000,000	16	6,406,486,000				



Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3,27,03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	-	-	-	-	40	3,100,000,000	45	2,200,000,000	50	3,200,000,000	55	3,500,000,000	55	12,000,000,000	
				Persentase lahan pertanian yang terlindungi	%	-	-	-	-	47.77		47.77		47.77		47.77		47.77		
				Luas sawah baru/GSM	ha	-	-	-	-	150		150		200		200		700		
		3,27,03,2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	dok	-	-	-	-	1	400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	1,900,000,000	
		3,27,03,2,01,0 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	dok	-	-	-	-	1	400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	1,900,000,000	
		3,27,03,2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg dibangun	unit	-	-	-	-	23	2,700,000,000	23	1,700,000,000	23	2,700,000,000	25	3,000,000,000	94	10,100,000,000	
		3,27,03,2,02,0 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	-	-	-	-	7	800,000,000	5	462,000,000	5	1,200,000,000	5	1,000,000,000	22	3,462,000,000	
		3,27,03,2,02,0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	-	-	-	-	6	600,000,000	6	418,000,000	5	700,000,000	8	1,100,000,000	25	2,818,000,000	
		3,27,03,2,02,0 4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	-	-	-	-	7	700,000,000	7	600,000,000	9	615,000,000	8	715,000,000	31	2,630,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3,27,03,2,02,06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit		-	-	-	1	100,000,000	2	70,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	240,000,000	
		3,27,03,2,02,08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit		-	-	-	1	400,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	7	700,000,000	
		3,27,03,2,02,09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit		-	-	-	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	250,000,000	
		3,27,05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditangani			-	-	-	25	500,000,000	26	550,000,000	27	600,000,000	30	640,000,000	72	2,290,000,000	
		3,27,05,2,01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	ha		-	-	-	2,000	500,000,000	2,000	500,000,000	2,000	500,000,000	2,000	640,000,000	8,000	2,140,000,000	
		3,27,05,2,01,0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	ha		-	-	-	1,000	250,000,000	1,000	250,000,000	1,000	250,000,000	1,000	250,000,000	4,000	1,000,000,000	
		3,27,05,2,01,02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yg tertangani	ha		-	-	-	1,000	250,000,000	1,000	250,000,000	1,000	250,000,000	1,000	390,000,000	4,000	1,140,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3,27,07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	-	-	-	-	12.5	1,976,610,369	14	2,060,718,081	17	2,171,932,443	20	2,200,529,065	20	8,409,789,958	
				Persentase 16 indikator kinerja penyuluh pertanian yang tercapai	%	-	-	-	-	70		75		80		85		85		
		3,27,07,2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	lap	-	-	-	-	1	1,976,610,369	1	2,060,718,081	1	2,171,932,443	1	2,200,529,065	4	8,409,789,958	
		3,27,07,2,01,0 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	-	-	-	-	6	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	30	800,000,000	
		3,27,07,2,01,0 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	-	-	-	-	114	100,000,000	114	184,107,712	114	200,000,000	114	200,000,000	456	684,107,712	
		3,27,07,2,01,0 3	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	-	-	-	-	6	1,576,610,369	8	1,576,610,369	8	1,671,932,443	8	1,700,529,065	30	6,525,682,246	
		3,27,07,2,01,0 4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	unit	-	-	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	400,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm ribu)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	point		-	-	-	68		70		73		75		75		
				Nilai SAKIP	predikat		-	-	-	BB		BB		BB		A		A		
		3,27,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat		-	-	-	BB	14,830,054,965	BB	14,815,192,589	BB	14,828,372,447	BB	14,832,777,101	BB	59,306,397,102	
		3,27,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	lap		-	-	-	1	13,201,054,965	1	13,291,192,589	1	13,294,372,447	1	13,294,777,101	4	53,081,397,102	
		3,27,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	ob		-	-	-	1,960	13,081,054,965	2,156	13,171,192,589	2,366	13,174,372,447	2,604	13,174,777,101	9,086	52,601,397,102	
		3,27,01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok		-	-	-	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	48	480,000,000	
		3,27,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	lap		-	-	-	1	225,000,000	1	226,000,000	1	220,000,000	1	250,000,000	4	921,000,000	
		3,27,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	pkt		-	-	-	4	5,000,000	4	6,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	16	21,000,000	
		3,27,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	pkt		-	-	-	4	38,000,000	4	38,000,000	4	33,000,000	4	38,000,000	16	147,000,000	
		3,27,01,2,06,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	pkt		-	-	-	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	16	8,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Prog/Keg/Sub Keg	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim ribu)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3,27,01,2,06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	pkt		-	-	-	-	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	16	40,000,000
		3,27,01,2,06,05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	pkt		-	-	-	-	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	16	20,000,000
		3,27,01,2,06,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok		-	-	-	-	1,900	15,000,000	1,900	15,000,000	1,900	15,000,000	1,900	15,000,000	1,900	15,000,000	7,600	60,000,000
		3,27,01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap		-	-	-	-	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	175,000,000	16	625,000,000
		3,27,01,2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	lap		-	-	-	-	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	350,000,000
		3,27,01,2,07,05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	pkt		-	-	-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000
		3,27,01,2,07,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		-	-	-	-	-	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	150,000,000
		3,27,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	lap		-	-	-	-	1	1,051,000,000	1	1,052,000,000	1	1,053,000,000	1	1,054,000,000	1	1,054,000,000	4	4,210,000,000
		3,27,01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lap		-	-	-	-	12	101,000,000	12	102,000,000	12	103,000,000	12	104,000,000	12	104,000,000	48	410,000,000



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah melalui Dinas Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 Sebelum Perubahan

NO	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									
I.1	Persentase peningkatan kontribusi sektor unggulan	%	68,96	69,01	69,14	-	-	-	-	-
I.2	Peningkatan produksi tan.pangan, hortikultura dan perkebunan :									
	Padi	ton	386.749	386.749	406.086	-	-	-	-	-
	Ubi Kayu	ton	638.004	638.004	669.904	-	-	-	-	-
	Jagung	ton	31.543	31.543	33.120	-	-	-	-	-
	Kelapa Sawit	ton	1.172.770,26	142.377,10	142.802,23	-	-	-	-	-
	Kelapa	ton	2.241,83	2.223,72	2.230,39	-	-	-	-	-
	Karet	ton	42.077,53	8.658,74	8.684,71	-	-	-	-	-
	Kakao	ton	800,02	645,63	647,57	-	-	-	-	-
	Aren	ton	-	17,40	17,45	-	-	-	-	-
	Sayur-Sayuran	ton	3.752	6.756	9.223	-	-	-	-	-
	Buah-Buahan	ton	73.466	62.001	44.784	-	-	-	-	-
I.3	Peningkatan luas tanam dan luas panen tanaman pangan dan hortikultura :									
	Luas Tanam :									
	Padi	ha	56.739	56.889	60.889	-	-	-	-	-
	Jagung	ha	4.639	4.689	4.739	-	-	-	-	-
	Ubi Kayu	ha	10.722	10.772	10.822	-	-	-	-	-
	Sayur-Sayuran	ha	785	866	946	-	-	-	-	-
	Buah-Buahan	ha	3.145,51	3.460,05	3.806,05	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Luas panen :									
	Padi	ha	63.725	62.054	66.054	-	-	-	-	-
	Jagung	ha	8.367	8.748	8.798	-	-	-	-	-
	Ubi Kayu	ha	13.443	13.491	13.541	-	-	-	-	-
	Sayur-Sayuran	ha	781	861	941	-	-	-	-	-
	Buah-Buahan	ha	2.516,40	2.768,04	3.044,84	-	-	-	-	-
I.4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan :									
	Padi	ton/ha	6,22	6,22	6,53	-	-	-	-	-
	Ubi kayu	ton/ha	47,46	47,46	49,83	-	-	-	-	-
	Jagung	ton/ha	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	-
	Kelapa sawit	Kg/ha	13.014,99	13.694,62	13.735,71	-	-	-	-	-
	Kelapa	kg/ha	1.129,47	1.160,18	1.163,66	-	-	-	-	-
I.5	Peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :									
	Padi Organik	ton	104,77	137	169	-	-	-	-	-
	Buah Organik	ton	180	230	280	-	-	-	-	-
	Penangkar Padi	ton	1.451	1.551	1.651	-	-	-	-	-
	Bawang Merah	ton	249	300	400	-	-	-	-	-
	Cabe Merah	ton	335	600	800	-	-	-	-	-
I.6	Peningkatan luas pertanian komoditas unggulan dan bernilai tambah :									
	Padi Organik	ha	42	47	52	-	-	-	-	-
	Buah Organik	ha	4	5	6	-	-	-	-	-
	Penangkar Padi	ha	494	514	534	-	-	-	-	-
	Bawang Merah	ha	41	40	80	-	-	-	-	-
	Cabe Merah	ha	110	120	160	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
II	IKK :									
II.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	predikat	B	BB	BB	-	-	-	-	-
II.2	Persentase Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	70	75	80	-	-	-	-	-
II.3	Luas sawah baru	ha	368	150	150	-	-	-	-	-
II.4	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan									
	Alat mesin pertanian		NA	0,26	0,26	-	-	-	-	-
	Pupuk		NA	0,32	1	-	-	-	-	-
	Pestisida		NA	0,15	1	-	-	-	-	-
	Benih/bibit		1	1	1	-	-	-	-	-
II.5	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	NA	15	20	-	-	-	-	-
II.6	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	%	NA	1	0	-	-	-	-	-
II.7	Jumlah promosi produk pertanian yang diikuti	kali	5	0	2	-	-	-	-	-
II.8	Jumlah produk lokal yang diekspor	Produk	0	1	1	-	-	-	-	-
II.9	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kel	0	30	40	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 Setelah Perubahan

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									
1*	Produksi Padi	ton		-	-	336.600	343.332	350.199	357.203	357.203
2	Produksi Ubi Kayu	ton		-	-	671.339	673.318	674.901	676.533	676.533
3	Produksi Kelapa Sawit	ton		-	-	143.232,64	143.662,34	143.833,87	145.305,55	145.305,55
4*	Produksi Cabe Merah	ton		-	-	1.278	1.406	1.546	1.701	1.701
5*	Produksi Bawang Merah	ton		-	-	466	490	514	540	540
6*	Produksi Padi Organik	ton		-	-	194	213	234	258	258

*) indikator kinerja SAPTA DAMBAAN ke 3 “*Pertanian Mandiri Berkelanjutan*”

NO	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
INDIKATOR KINERJA KUNCI :									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1273,30	1280,58	1287,86	1295,53	1302,61	1309,70	1309,70
2	Sarana pertanian yang diberikan	jenis	5	5	5	5	5	5	5
3	Prasarana pertanian yang digunakan	unit	15	20	23	23	23	25	25
4	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	15	20	25	26	27	30	15
INDIKATOR PROGRAM :									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	predikat	-	-	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	%	-	-	40	45	50	55	55
3	Persentase lahan pertanian yang terlindungi		-	-	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77
4	Luas gerakan sawah mandiri	ha	-	-	150	150	200	200	1000
5	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan								
5.1	- Alat mesin pertanian		-	-	0,45	0,50	0,55	0,6	0,6
5.2	- Pupuk		-	-	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
5.3	- Pestisida		-	-	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6
5.4	- Benih		-	-	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
6	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	-	-	25	26	27	30	30
7	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	%	-	-	12.5	14	17	20	20
8	Persentase 16 indikator kinerja penyuluh pertanian yang tercapai	%	-	-	70	75	80	82	82

Tabel 7.2. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab Data
1.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian	Nilai PDRB atas harga berlaku sektor pertanian	Nilai PDRB atas harga berlaku sektor pertanian	BPS Kab. Serdang Bedagai	BPS Kab. Serdang Bedagai
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi (ton/thn)	Produksi merupakan jumlah total hasil suatu komoditas dari lahan pertanian yang di panen atau sama dengan produktivitas (produksi per ha/thn) komoditas tersebut dikali dengan keseluruhan luas lahan komoditas tersebut yang dapat di panen	Jumlah Produksi padi tahun-n = produktivitas padi tahun n x luas panen padi tahun n	BPS Kab. Serdang Bedagai Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai
		Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton/thn)		Jumlah Produksi ubi kayu tahun-n = produktivitas ubi kayu tahun n x luas ubi kayu tahun n		
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit (ton/thn)		Jumlah Produksi kelapa sawit tahun-n = produktivitas kelapa sawit tahun n x luas tanaman kelapa sawit menghasilkan tahun n		
		Jumlah Produksi Padi Organik (ton/thn)		Jumlah Produksi padi organik tahun-n = Luas panen padi organik tahun n x produktivitas padi organik tahun n		
		Produksi Bawang Merah (ton/thn)		Jumlah Produksi bawang merah tahun-n = produktivitas bawang merah tahun n x luas panen bawang merah tahun n		
		Jumlah Produksi Cabe Merah (ton/thn)		Jumlah Produksi cabe merah tahun-n = produktivitas cabe merah tahun n x luas panen cabe merah tahun n		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab Data
3.	Meningkatnya Luas Panen	Jumlah Luas Panen Padi (ha/thn)	Luas Panen merupakan jumlah total luas lahan komoditas tersebut yang dapat di panen	Jumlah Luas panen padi tahun-n = luas panen padi tahun n	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai
		Jumlah Luas Panen Ubi Kayu (ha/thn)		Jumlah Luas panen ubi kayu tahun-n = luas panen ubi kayu tahun n		
		Jumlah Luas Panen Kelapa Sawit (ha/thn)		Jumlah Luas panen kelapa sawit tahun-n = luas tanaman kelapa sawit menghasilkan tahun n		
		Jumlah Luas Panen Padi Organik (ha/thn)		Jumlah Luas panen padi organik tahun-n = luas panen padi organik tahun n		
		Jumlah Luas Panen Bawang Merah (ha/thn)		Jumlah Luas panen bawang merah tahun-n = luas panen bawang merah tahun n		
		Jumlah Luas Panen Cabe Merah (ha/thn)		Jumlah Luas panen cabe merah tahun-n = luas panen cabe merah tahun n		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab Data
4.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Jumlah Produktivitas Padi (ton/ha)	Produktivitas merupakan jumlah rata-rata produksi suatu komoditas per satuan luas tanaman yang dipanen	Jumlah Produktivitas padi tahun-n = produksi padi tahun n : luas panen padi tahun n	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai
		Jumlah Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha)		Jumlah Produktivitas ubi kayu tahun-n = produksi ubi kayu tahun n : luas ubi kayu tahun n		
		Jumlah Produktivitas Kelapa Sawit (ton/ha)		Jumlah Produktivitas kelapa sawit tahun-n = produksi kelapa sawit tahun n : luas tanaman kelapa sawit menghasilkan tahun n		
		Jumlah Produktivitas i Padi Organik (ton/ha)		Jumlah Produktivitas padi organik tahun-n = produksi padi organik tahun n : luas panen padi organik tahun n		
		Jumlah Produktivitas Bawang Merah (ton/ha)		Jumlah Produktivitas bawang merah tahun-n = produksi bawang merah tahun n : luas panen bawang merah tahun n		
		Jumlah Produktivitas Cabe Merah (ton/ha)		Jumlah Produktivitas cabe merah tahun-n = produksi cabe merah tahun n : luas panen cabe merah tahun n		
5	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	Peringkat dari hasil penilaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun-n = Hasil penilaian SAKIP Dinas Pertanian tahun n	Inspektorat Kab. Serdang Bedagai	Inspektorat Kab. Serdang Bedagai

IKK			
NO.	IKK DAN INDIKATOR PROGRAM	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun = $\frac{\text{Jumlah produksi pangan per tahun}}{\text{Luas panen per tahun}} \times 100\%$	Produktivitas adalah jumlah total hasil produksi tanaman pangan per tahun dibagi luas panen tanaman pangan per tahun
2	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis-jenis sarana produksi pertanian yang berikan kepada kelembagaan petani tahun n	Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian
3	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan tahun n	Prasarana pertanian merupakan segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana pertanian dalam bentuk benda tidak bergerak
4	Persentase prasarana yang digunakan	Persentase prasarana yang digunakan tahun-n = $\frac{\text{Jumlah total prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan pada tahun n}}{\text{Jumlah total prasarana yang dibangun tahun n}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan Dinas Pertanian dalam menangani bencana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
5	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani = $\frac{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena yang dibantu tahun n}}{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana tahun n}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan Dinas Pertanian dalam menangani bencana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
INDIKATOR PROGRAM			
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun-n = Hasil penilaian SAKIP Dinas Pertanian tahun n	Peringkat dari hasil penilaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi SAKIP
2	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian = $\frac{\text{Jumlah total prasarana yang dibangun tahun n}}{\text{Jumlah total usulan pembangunan prasarana tahun n}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan pemenuhan prasarana yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
3	Persentase lahan pertanian yang terlindungi	Persentase lahan pertanian yang terlindungi = $\frac{\text{Jumlah total lahan pertanian pangan yang dilindungi dalam regulasi LP2B tahun n}}{\text{Jumlah total lahan pertanian pangan keseluruhan (sawah eksisting + ladang + tegal) tahun n}} \times 100\%$	Perbandingan luas lahan pertanian yang dilindungi dalam regulasi LP2B dengan luas total lahan pertanian pangan keseluruhan

NO.	IKK DAN INDIKATOR PROGRAM	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI
4	Luas gerakan sawah mandiri	Luas gerakan sawah mandiri = Jumlah luas sawah baru hasil gerakan sawah mandiri	Luas sawah baru yang dihasilkan dari gerakan sawah mandiri
5	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan	Suatu perbandingan ketersediaan sarana produksi terhadap kebutuhan, semakin kecil nilai rasio menandakan bahwa kebutuhan sarana produksi belum terpenuhi dengan baik
5.1	- Alat mesin pertanian	Alat mesin pertanian = $\frac{\text{Jumlah total alat mesin pertanian yang tersedia tahun } n}{\text{Jumlah alat mesin pertanian yang dibutuhkan tahun } n}$	
5.2	- Pupuk	Pupuk = $\frac{\text{Jumlah total alokasi pupuk tahun } n}{\text{Jumlah kebutuhan pupuk yang diinput dalam sistem e-alokasi tahun } n}$	
5.3	- Pestisida	Pestisida = $\frac{\text{Jumlah total pestisida tersedia tahun } n}{\text{Jumlah kebutuhan pestisida pengendalian OPT tahun } n}$	
5.4	- Benih/bibit	Benih/bibit = $\frac{\text{Jumlah total bantuan benih/bibit tahun } n}{\text{Jumlah kebutuhan benih/bibit tahun } n}$	
6	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani = $\frac{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana yang dibantu tahun } n}{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana tahun } n} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan Dinas Pertanian dalam menangani bencana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
7	Persentase Jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas = $\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang memenuhi standar naik kelas tahun } n}{\text{Jumlah seluruh kelompok tani tahun } n} \times 100\%$	Jumlah kelompok tani yang meningkat peringkatnya dari pemula ke tingkat selanjutnya
8	Persentase 16 indikator kinerja penyuluh pertanian yang tercapai	Persentase 16 indikator kinerja penyuluh pertanian yang tercapai = $\frac{\text{Jumlah indikator kinerja penyuluh yang tercapai tahun } n}{\text{Jumlah indikator kinerja penyuluh (16 indikator) tahun } n} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan pencapaian kinerja penyuluh yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Serdang Bedagai, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 - 2033.

8.1. Kesimpulan

1. Diharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, serta dapat berperan aktif sehingga tujuan dari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dapat terwujud
2. Memperhatikan kondisi permasalahan maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan

8.2. Saran

1. Seluruh jajaran aparatur di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai agar mempedomani dan mendukung pencapaian target-target pada Renstra Perubahan
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Renstra Perubahan dengan sebaik-baiknya dengan mengupayakan potensi yang tersedia
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan
4. Mempedomani Renstra Perubahan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan sehingga selaras untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian

5. Perlunya dilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perubahan secara berkala

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 – 2026 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan bermanfaat bagi pembangunan sektor pertanian.

Sei Rampah, September 2023
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



DEDY SIKILAWAN, SP. MM
Bendahara Tk I
19780208 200502 1 001